



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023**



**Hamengku Buwono X
Gubernur DIY**

**Paku Alam X
Wakil Gubernur DIY**

Assalamu 'alaikum warahmatullaahi wa barakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua.

Saudara-saudara warga masyarakat DIY yang saya hormati dan cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat *Allah Subhanahu Wata'ala* atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah DIY Tahun 2023.

Penyusunan dan penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab kami sebagai Gubernur kepada masyarakat DIY. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini juga merupakan tanggung jawab pelaksanaan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa Kepala Daerah wajib menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan DIY sangat terkait dengan visi-misi Pemerintah Daerah DIY. Visi Gubernur Tahun 2022 – 2027 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027 yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 April 2023 pada intinya adalah ***untuk lebih mewujudkan kekurangan pencapaian pada Visi-Misi sebelumnya*** (yaitu "*Renaissance Yogyakarta/Among Tani Dagang Layar 2012 – 2017*" dan "*Menyongsong Abad Samudra untuk Kemuliaan Martabat Manusia Yogyakarta 2017- 2022*"), yang kemudian dikemas dalam lima tujuan mulia (Pancamulia), serta sekaligus menanggapi isu-isu nasional maupun global saat ini. Dalam cakupan maksud sebagaimana disampaikan di atas, maka Visi Gubernur DIY 2022 – 2027 adalah:

***Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi
Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya
Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.***

Terwujudnya 'Pancamulia', menyandang misi untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi DIY, melalui capaian-capaian yang dapat diukur dengan beberapa ukuran seperti: 1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan, 2) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan, 3) Lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram, 4) Kehidupan ekonomi yang layak, 5) Mengecilnya ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah), serta 6) *Good-governance* pada berbagai tingkatan.

Dengan rumusan Visi sebagaimana diutarakan di atas, maka dapat dirumuskan empat (4) misi yang pada prinsipnya merupakan pernyataan usaha atau apa-apa yang harus dikerjakan agar Visi yang diharapkan dapat terwujud. Dari visi *Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi*, terdapat empat Misi yang dapat dirumuskan yakni:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui Reformasi Kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

Adapun tema pembangunan tahun 2023 yang tertuang dalam RKPD DIY Tahun 2023 yaitu: **"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan"**. Tema tersebut dipilih dengan dasar pemikiran bahwa dalam rangka perwujudan visi jangka panjang DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan pariwisata di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera, maka DIY harus memiliki daya saing di berbagai sektor agar bisa mencapai cita-cita tersebut. Kualitas SDM menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing untuk menghadapi tantangan global, termasuk dalam keterbukaan perekonomian antar negara. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dimaksudkan sebagai penggerak ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi wilayah, terutama di era kompetitif global dan di masa pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung. Mendasarkan pada tema pembangunan tersebut maka prioritas pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya);
2. Pemulihan ekonomi;
3. Penurunan kemiskinan;
4. Pengurangan *gap* ketimpangan wilayah;
5. Peningkatan kualitas layanan publik;
6. Menjaga daya dukung lingkungan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2023 merupakan laporan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Selama tahun 2023 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada umumnya telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

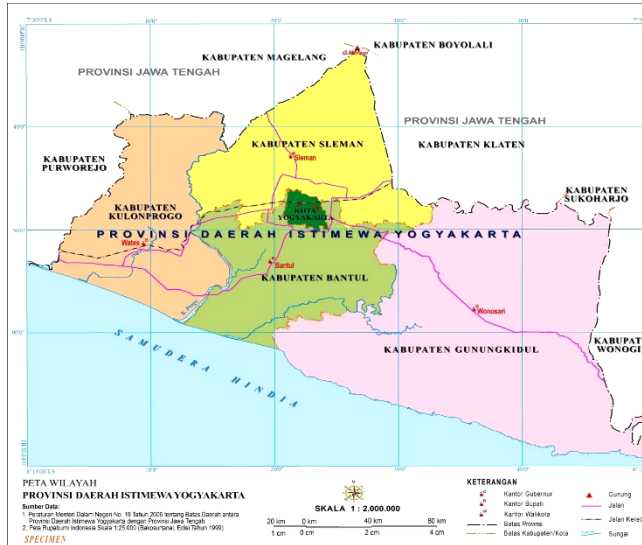
GAMBARAN UMUM:

Daerah Istimewa Yogyakarta posisinya terletak diantara 7^o.33'-8^o.12' Lintang Selatan dan 110^o.00'-110^o.50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas wilayah daratan 3.133,15 km² atau 0,16% dari luas wilayah daratan Indonesia (1.916.906,77 km²). Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan luas wilayah terkecil kedua setelah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri dari:

1. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,28 km² (18,71%);
2. Kabupaten Bantul, dengan luas 508,13 km² (16,22%);

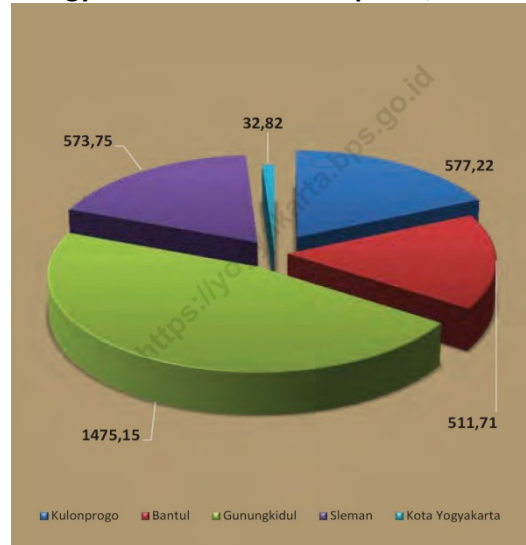
3. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.431,42 km² (45,69%);
4. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,35%);
5. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,04%).

Peta Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta



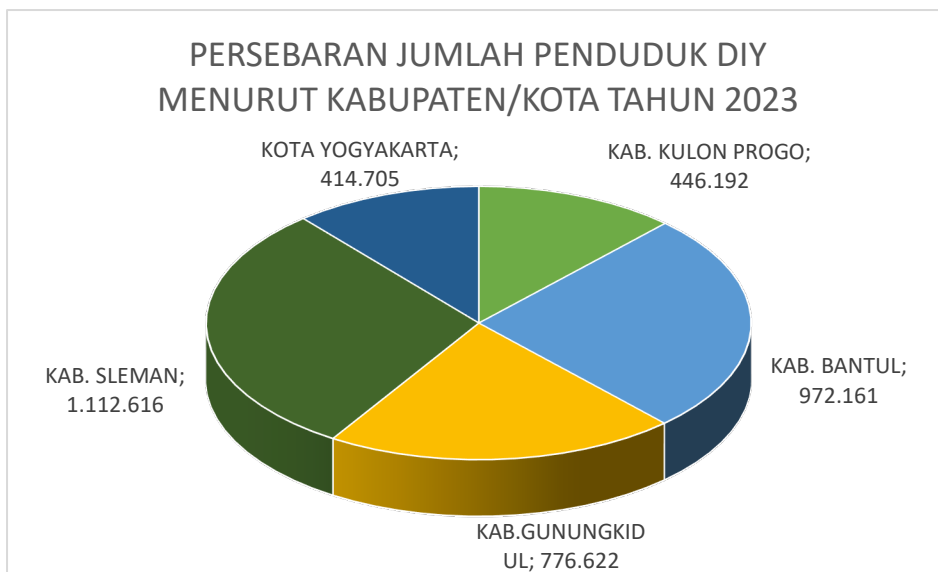
Sumber: Lampiran UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY

Grafik Luas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota



Sumber: BPS, 2024

Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 berdasarkan data kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta Semester 2 tahun 2023 (Per 31 Desember 2023) adalah sebanyak 3.722.296 orang. Persebaran penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menurut kabupaten/kota tahun 2023 terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sejumlah 1.112.616 orang (29,89%) diikuti oleh Kabupaten Bantul sejumlah 972.161 orang (26,12%), Kabupaten Gunungkidul sejumlah 776.622 orang (20,86%), Kabupaten Kulon Progo sejumlah 446.192 orang (11,99%) dan Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sejumlah 414.705 orang (11,14%).



Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri per 31 Desember 2023 (Semester 2 Tahun 2023) dikompilasi oleh Biro Tapem Setda DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 14 Kemantren (setingkat kecamatan di kota) dan 64 kapanewon (setingkat kecamatan di kabupaten) serta 438 Kalurahan/Kelurahan. Berdasarkan Pergub DIY 25/2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, masing-masing kabupaten telah menerapkan perubahan nomenklatur kelembagaan kecamatan menjadi kemantren/kapanewon dan desa menjadi kalurahan sejak tahun 2021 secara penuh sebagaimana tersebut di dalam tabel sebagai berikut.

Tabel Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Kapanewon/ Kemantren	Kalurahan	Kelurahan
1	Kulon Progo	12	87	1
2	Bantul	17	75	-
3	Gunungkidul	18	144	-
4	Sleman	17	86	-
5	Kota Yogyakarta	14	-	45
	DIY	78	392	46

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

A. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Pemda DIY pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja Makro

NO	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1 (2022)	Capaian Kinerja Tahun N (2023)	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	80,64	81,09	$\frac{(81,09-80,64)}{80,64} \times 100\% = 0,56\%$
2	Angka Kemiskinan	11,49%	11,04%	$\frac{(11,04 - 11,49)}{11,49} \times 100\% = - 3,92\%^*$
3	Angka Pengangguran	4,06%	3,69%	$\frac{(3,69-4,06)}{4,06} \times 100\% = -9,11\%^*$
4	Pertumbuhan Ekonomi	112.898.323 juta rupiah	118.626.843 juta rupiah	$\frac{(118.626.843 \text{ juta rupiah} - 112.898.323 \text{ juta rupiah})}{112.898.323 \text{ juta rupiah}} \times 100\% = 5,07\%$
5	Pendapatan Per Kapita	44,85 juta rupiah	48,54 juta rupiah	$\frac{(48,54 \text{ juta rupiah} - 44,85 \text{ juta rupiah})}{44,85 \text{ juta rupiah}} \times 100\% = 8,23\%$

NO	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1 (2022)	Capaian Kinerja Tahun N (2023)	Perubahan (%)
6	Ketimpangan Pendapatan	0,459	0,449	$\frac{(0,449-0,459)}{0,449} \times 100\% = -2,23\%*$

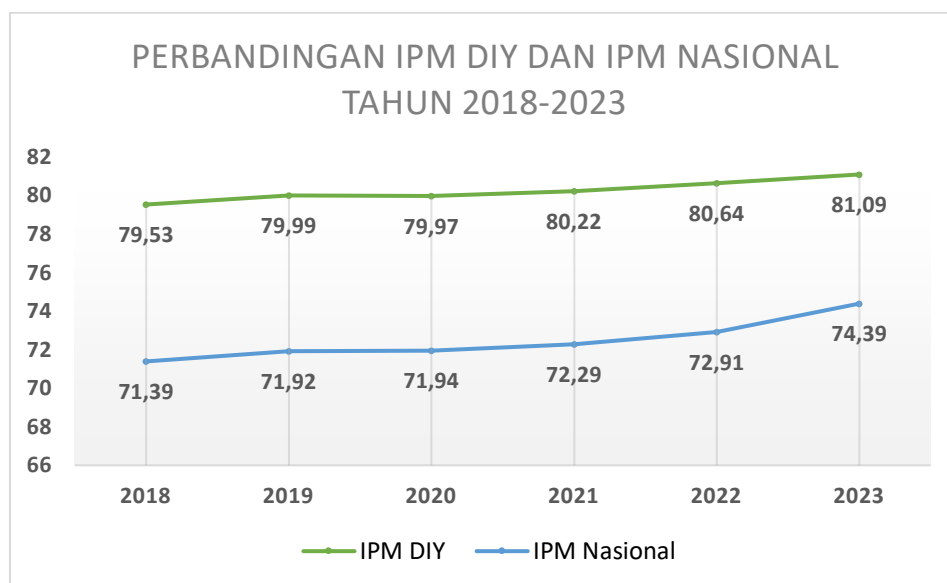
Sumber: BPS, 2024 *Keterangan : perubahan dihitung menggunakan rumus sesuai Pedoman Umum Penyusunan LPPD tahun 2023, dan nilai negatif (-) tidak mencerminkan penurunan kinerja indikator makro, melainkan perbaikan kinerja indikator makro, khususnya pada angka kemiskinan, angka pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

IPM merupakan salah satu indikator pembangunan jangka menengah di DIY yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027. Dalam mencapai salah satu misi pembangunan DIY ‘Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui Reformasi Kalurahan’ ditetapkan sasaran yang ingin dicapai yaitu ‘Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan’, yang keberhasilannya diukur dengan IPM. IPM merupakan indeks komposit yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu :

- Umur harapan hidup saat lahir;
- Harapan lama sekolah;
- Rata-rata lama sekolah;
- Pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

IPM di DIY mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dan selalu berada di atas IPM nasional. Perbandingan IPM DIY dan IPM nasional selama tahun 2018 hingga 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber: BPS, 2024 (diolah)

IPM DIY mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, yaitu naik sebesar 0,44 dari 80,64 pada tahun 2022 menjadi 81,09 pada tahun 2023. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023, IPM DIY selalu berada di atas IPM Nasional. Sejak tahun 2021, status pembangunan manusia DIY sudah

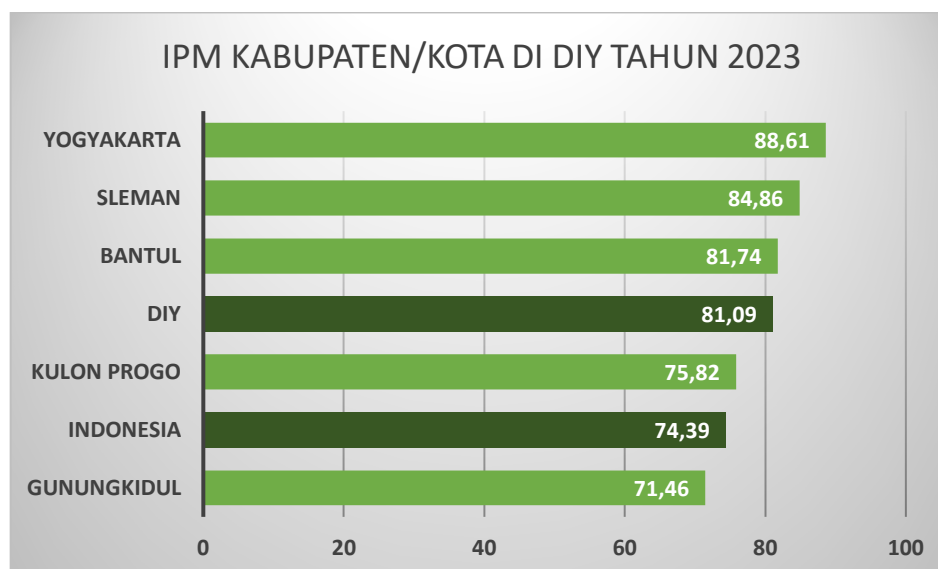
berada pada level “sangat tinggi”. Nilai IPM DIY pada masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Jumlah Nilai Indeks Komponen IPM DIY 2020-2023

No	Komponen	2020	2021	2022	2023
1	Umur Harapan Hidup saat Lahir (Tahun)	74,95	75,04	75,08	75,18
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15,59	15,64	15,65	15,66
3	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,55	9,64	9,75	9,83
4	Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) Rp000	14.015	14.111	14.482	14.924

Sumber: BPS, 2024

Pembangunan manusia tingkat kabupaten/kota selama tahun 2020-2023 mengindikasikan pencapaian yang sangat baik karena kabupaten/kota di DIY sudah berstatus “sangat tinggi” dan “tinggi”. Tahun 2023 IPM Kota Yogyakarta mencapai 88,61 dan tercatat paling tinggi di antara kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta. Capaian IPM tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Sleman dan Bantul masing-masing sebesar 84,86 dan 81,74. Ketiga kabupaten/ kota tersebut menjadi daerah dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi”. Sementara IPM Kulon Progo dan Gunungkidul tercatat masing-masing sebesar 75,82 dan 71,46 dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi”. Nilai IPM kabupaten/kota dibandingkan dengan IPM DIY dan nasional dapat dilihat pada gambar berikut:



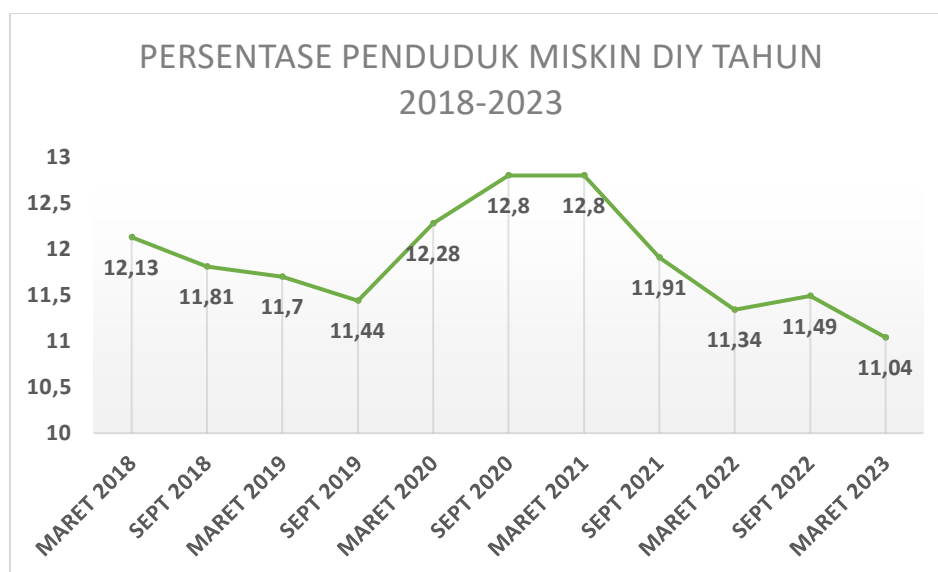
Sumber: BPS, 2024

IPM Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul berada di atas IPM DIY, sementara IPM Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul masih berada di bawah IPM DIY. Jika dibandingkan dengan IPM Nasional, hanya Kabupaten Gunungkidul yang memiliki nilai IPM di bawah IPM Nasional.

2. ANGKA KEMISKINAN

Angka kemiskinan menjadi salah satu indikator pengukuran kemiskinan, yang merupakan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pemda DIY terus melakukan berbagai program

penanggulangan kemiskinan dengan memfokuskan penanganan kemiskinan pada lokasi prioritas. Pada tahun 2023, angka kemiskinan menurun dibandingkan tahun 2022, yaitu dari 11,49% menjadi 11,04%, yang berarti proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan berkurang. Persentase penduduk miskin DIY dari tahun 2018 hingga 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber: BPS, 2024

Secara umum, pada periode Maret 2016 – Maret 2023, tingkat kemiskinan di DIY menunjukkan kecenderungan menurun, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Namun demikian, terdapat beberapa fluktuasi peningkatan kemiskinan. Pada Maret 2020, September 2020, dan Maret 2021 terjadi peningkatan kemiskinan yang di antaranya disebabkan wabah *Covid-19*. Pada bulan September 2021 dan Maret 2022 terjadi tren penurunan tingkat kemiskinan. Namun, pada September 2022 kemiskinan kembali mengalami kenaikan. Sedangkan pada Maret 2023 kemiskinan kembali mengalami penurunan. Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DIY Menurut Daerah
September 2021- September 2023**

Daerah	Tahun	Jumlah penduduk miskin (ribu orang)	Persentase penduduk miskin
Perkotaan	September 2021	331,71	11,20
	Maret 2022	315,46	10,56
	September 2022	321,07	10,64
	Maret 2023	312,83	10,27
Perdesaan	September 2021	142,78	13,99
	Maret 2022	139,30	13,65
	September 2022	142,57	14,00
	Maret 2023	135,63	13,36
Total	September 2021	474,49	11,91
	Maret 2022	454,76	11,34

Daerah	Tahun	Jumlah penduduk miskin (ribu orang)	Persentase penduduk miskin
	September 2022	463,63	11,49
	Maret 2023	448,47	11,04

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan analisis BPS, berikut faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan DIY selama periode September 2022-Maret 2023:

1. Pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 sebesar 5,31% (y-on-y). Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan kondisi enam bulan sebelumnya, di mana perekonomian DIY mengalami pertumbuhan sebesar 6,20% (y-on-y).
2. Inflasi selama Maret 2022 - Maret 2023 sebesar 6,11%. Sementara itu inflasi selama September 2021 – September 2022 sebesar 6,81%.
3. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2023 sebesar 102,14%, menunjukkan adanya kenaikan sebesar 4,08% poin dibandingkan NTP bulan September 2022.
4. Neraca perdagangan pada Maret 2023 mengalami surplus US\$ 28,3 juta. Di mana nilai ekspor sebesar US\$ 41,6 juta dan nilai impor sebesar US\$ 13,3 juta
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2023 sebesar 3,58% menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,48% poin dibandingkan Agustus 2022. Penurunan TPT terjadi di perkotaan sebesar 0,88% poin. Sebaliknya di perdesaan, TPT mengalami kenaikan sebesar 0,69% poin.

3. ANGKA PENGANGGURAN

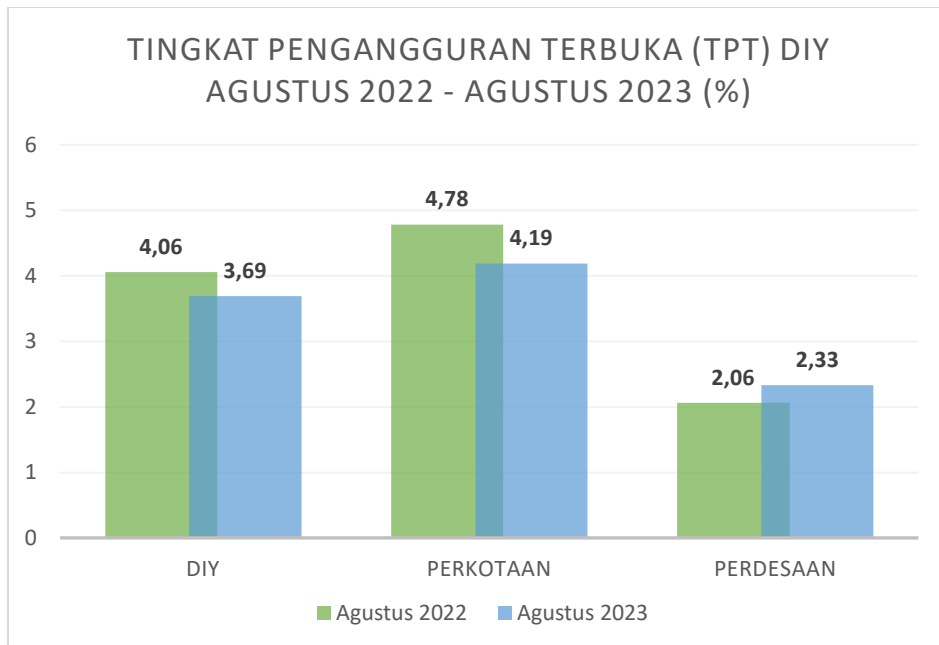
Angka pengangguran direfleksikan dari data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2023, TPT DIY adalah sebesar 3,69%, mengalami penurunan 0,37% poin dibanding TPT Agustus 2022 yang sebesar 4,06%. Jumlah angkatan kerja di DIY pada Agustus 2023 sebanyak 2,221 juta orang, mengalami penurunan sekitar 113.270 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Namun, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan 1,48% poin dibandingkan Agustus 2022. Kondisi penduduk usia kerja dan angkatan kerja di DIY dari Agustus 2022 hingga Agustus 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021-Agustus 2023

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2022 (ribu orang)	Agustus 2023 (ribu orang)
Penduduk usia kerja	3.217,87	2.998,93
Angkatan kerja	2.336,08	2.221,69
- Bekerja	2.241,13	2.139,71
- Pengangguran	94,95	81,98
- Bukan angkatan kerja	881,80	777,23

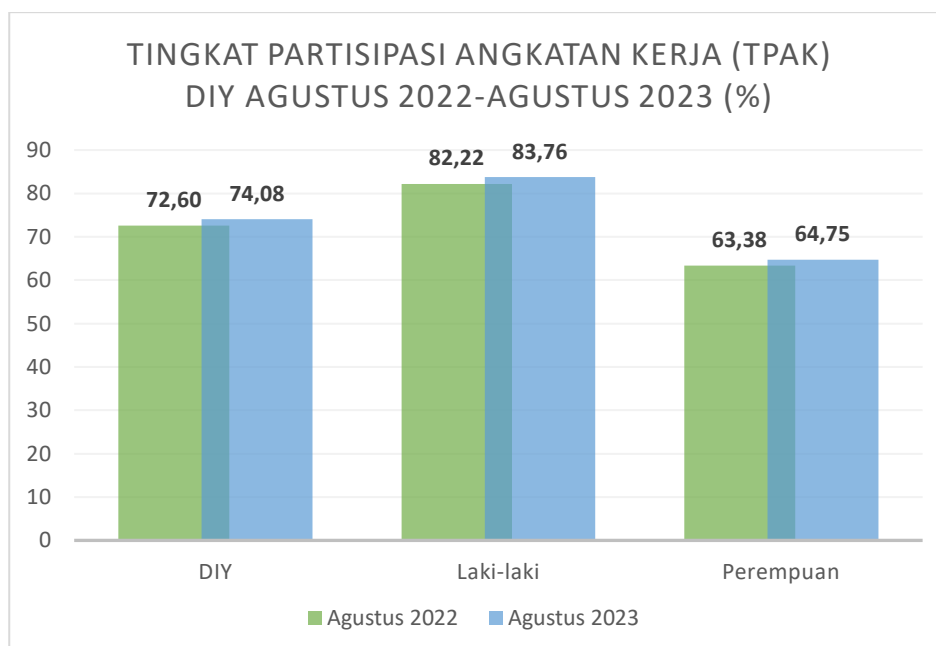
Sumber: BPS, 2024

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Agustus 2021 hingga Agustus 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber: BPS, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Agustus 2023 mengalami penurunan 0,37% poin dibandingkan TPT DIY Agustus 2022. Penurunan TPT terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di daerah perkotaan, TPT mengalami penurunan 0,59% poin, dari 4,78% menjadi 4,19%. Sementara, TPT di perdesaan mengalami kenaikan sebesar 0,27% poin, yaitu dari 2,06% menjadi 2,33%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY Agustus 2022 hingga Agustus 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber: BPS, 2024

4. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2023 sebesar 5,07% (c-to-c). Dibandingkan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 lebih kecil 0,08% poin. Perekonomian DIY pada triwulan IV-

2023 terhadap triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 4,86% (y-on-y), dan terhadap triwulan III-2023 tumbuh sebesar 2,90% (q-to-q). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY atas dasar harga berlaku triwulan IV-2023 mencapai Rp.46,60 triliun, dan atas dasar harga konstan mencapai Rp.30,40 triliun. PDRB DIY atas dasar harga konstan dan harga berlaku pada tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2022 dan 2023

PDRB	TW I (juta rupiah)	TW II (juta rupiah)	TW III (juta rupiah)	TW IV (juta rupiah)
PDRB ADHB 2022	39.619.275,84	40.708.786,92	41.511.523,56	43.281.202
PDRB ADHB 2023	44.324.449	44.835.267	44.931.944	46.595.373
PDRB ADHK 2022	27.641.472,13	27.912.841,36	28.029.672,84	28.990.251
PDRB ADHK 2023	29.209.247	29.473.144	29.542.668	30.397.929

Sumber: BPS, 2024

Pertumbuhan ekonomi DIY dari tahun 2020 hingga 2023 (*year on year*) dapat dilihat pada grafik berikut :



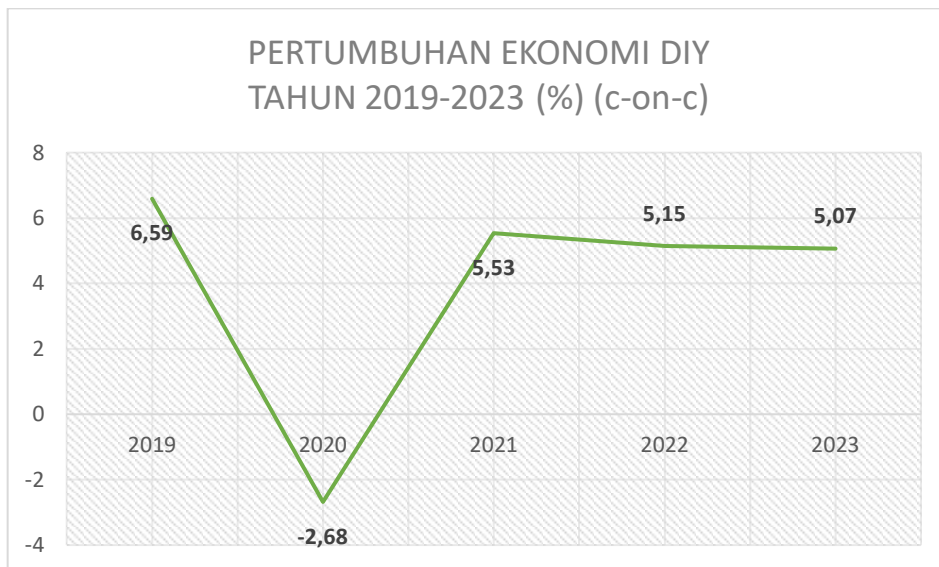
Sumber: BPS, 2024

Pertumbuhan Ekonomi DIY pada tahun 2020 hingga 2023 (*quarter to quarter*) dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS, 2024

Dari data pertumbuhan ekonomi DIY dari 2020 hingga 2023 baik secara (y-on-y) maupun (q-to-q) dapat terlihat bahwa dinamika kinerja perekonomian DIY cukup tinggi pada tahun 2020 dan 2021, dan relatif stabil pada tahun 2022 dan 2023. Pertumbuhan rata-rata secara (y-on-y) sebesar 3,23%, dan pertumbuhan rata-rata secara (q-to-q) sebesar 0,80%. Hal ini juga ditunjukkan oleh data pertumbuhan ekonomi secara kumulatif (c-to-c). Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi DIY dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber: BPS, 2024

Dari data pertumbuhan ekonomi *cumulative to cumulative* (c-to-c), ekonomi DIY pada tahun 2019 sebesar 6,59%, kemudian mengalami kontraksi sebesar 2,68% pada tahun 2020, naik menjadi 5,53% pada tahun 2021, pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 5,15%, kemudian menurun lagi pada tahun 2023 menjadi sebesar 5,07%. Meskipun demikian, tidak terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 2022.

5. PENDAPATAN PER KAPITA

Produk Domestik regional Bruto (PDRB) DIY Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2023 sebesar Rp.180.689.953 juta, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2023 sebesar Rp.118.626.843 juta. Jumlah penduduk DIY per semester 2 tahun 2023 berdasarkan data Biro Tata Pemerintahan sebanyak 3.722.296 jiwa, sehingga diperoleh PDRB per kapita pada tahun 2023 sebesar Rp.48,54 juta. PDRB DIY berdasarkan pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2021-2023

Komponen	2022		2023		Laju pertumbuhan
	PDRB ADHB (juta rupiah)	PDRB ADHK (juta rupiah)	PDRB ADHB (juta rupiah)	PDRB ADHK (juta rupiah)	
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	102.110.228	60.669.942	111.847.122	63.654.109	4,92
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4.819.250	2.883.786	5.465.488	3.135.978	8,75
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	24.184.623	13.959.092	25.582.648	14.287.759	2,35
Pembentukan Modal tetap Bruto	53.972.182	29.774.647	59.938.746	31.709.055	6,50
Perubahan Inventori	1.798.439	1.283.142	1.734.039	1.202.099	-
Ekspor Barang dan Jasa	90.423.664	53.219.229	92.037.863	54.263.402	1,96
Impor Barang dan Jasa	111.589.965	48.888.514	115.915.954	49.625.559	1,51
PDRB	165.718.437	112.901.323	180.689.953	118.626.843	5,07

Sumber: BPS, 2024

PDRB per kapita DIY pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.3,69 juta jika dibandingkan tahun 2022, yaitu dari Rp.48,54 juta menjadi Rp.44,85 juta. PDRB per kapita DIY tahun 2018 hingga 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber: BPS, 2024 (diolah)

6. KETIMPANGAN PENDAPATAN (INDEKS GINI)

Ketimpangan pendapatan diukur menggunakan rasio gini. Rasio gini berkisar antara nol dan satu. Nilai rasio gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio gini DIY pada Maret 2023 sebesar 0,449, mengalami penurunan dari September 2022 yang sebesar 0,459. Rasio gini DIY pada tahun 2020 hingga 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber: BPS, 2024

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DIY yang diukur dengan menggunakan indikator rasio gini sebesar 0,449. Angka ini turun 0,010 poin jika dibandingkan dengan rasio gini September 2022 yang besarnya 0,459. Namun jika dibandingkan dengan rasio gini Maret 2022 yang besarnya 0,439, terlihat adanya peningkatan sebesar 0,010 poin. Distribusi pengeluaran penduduk DIY September 2021 hingga Maret 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Distribusi Pengeluaran Penduduk DIY Maret 2022-Maret 2023 (%)

Daerah	Tahun	Penduduk 40% Terbawah	Penduduk 40% Teratas	Penduduk 20% Teratas
Perkotaan	Maret 2022	15,53	32,11	52,36
	September 2022	14,91	30,40	54,69
	Maret 2023	15,21	31,43	53,36
Perdesaan	Maret 2022	20,88	36,34	42,78
	September 2022	20,42	35,58	44,00
	Maret 2023	19,76	34,59	45,65
Total	Maret 2022	16,07	32,32	51,61
	September 2022	15,54	30,69	53,77
	Maret 2023	15,58	31,68	52,74

Sumber: BPS 2024

Secara keseluruhan terjadi peningkatan kontribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah dan kelompok penduduk 40% teratas.

B. RINGKASAN CAPAIAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN

1.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Pemda DIY pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan di DIY Tahun 2022-2023

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	81,49%	97,69%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	92,59%	90,42%

Sumber: Dinas Pendidikan DIY, 2024 (diolah)

1.2. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Pemda DIY Tahun 2023 sebesar Rp1.500.560.986.869,00 (96,12%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan, dengan kegiatan:
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
 - Pengelolaan Pendidikan Khusus
- b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan:
 - Pemindehan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
- c. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, dengan kegiatan:
 - Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
- d. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, dengan kegiatan:
 - Pendidikan Berbasis Budaya

1.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Pemda DIY Tahun 2023 yaitu keterbatasan anggaran dalam upaya pemenuhan kapasitas lembaga pendidikan untuk menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan guna mencapai standar tertentu. Keterbatasan anggaran juga dapat berdampak pada pelaksanaan program peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan.

2. URUSAN KESEHATAN

2.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Pemda DIY pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan di DIY Tahun 2022-2023

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	2,25%	2,32%
2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100%	100%
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%
4	Persentase pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100%	tidak ada KLB

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2024 (diolah)

2.2. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Anggaran belanja Urusan Kesehatan di Pemda DIY Tahun 2023 sebesar Rp569.885.516.362,00 yang direalisasikan melalui Dinas Kesehatan dengan serapan sebesar Rp283.756.976.586,20 (74,26%), melalui RS Jiwa Grhasia sebesar Rp59.704.532.477,00 (81,24%), dan melalui RS Respira sebesar Rp98.316.404.118 (87,08) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan:
 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan:
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dengan kegiatan:
 - Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan kegiatan:
 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan kegiatan:
 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
- f. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan:
 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

2.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Pemda DIY Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dalam antisipasi dan penanganan KLB dan bencana.
- b. Masih tingginya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) antara lain: stoke, hipertensi, diabetes, dan kanker, dan gangguan jiwa.
- c. Angka stunting masih cukup tinggi.
- d. Jumlah kasus kematian ibu masih fluktuatif.
- e. Kasus kematian bayi masih tinggi (pada tahun 2023 terdapat 274 kasus).
- f. Prevalensi balita gizi kurang atau Kurang Energi Protein (KEP) di DIY cenderung fluktuatif.
- g. Ketersediaan tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit di DIY pada umumnya sudah baik, namun bila dilihat dari persebarannya masih belum merata antar kabupaten/kota di DIY.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

3.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum yang diperoleh oleh Pemda DIY pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum di DIY Tahun 2022-2023

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Tidak ada WS kewenangan provinsi (Permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di DIY tidak terdapat Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / kota, yang ada adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Pusat)	Tidak ada WS kewenangan provinsi (Permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di DIY tidak terdapat Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / kota, yang ada adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Pusat)
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	Tidak ada WS kewenangan provinsi (Permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di DIY tidak terdapat Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / kota, yang ada adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Pusat)	Tidak ada WS kewenangan provinsi (Permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di DIY tidak terdapat Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / kota, yang ada adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Pusat)
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%	100%
4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas	20,98%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
	kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota		
5	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	34,98%	36,27%
6	Rasio kemantapan jalan	70,18 %	70,58%
7	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	68,08%	84,51%

Sumber: Dinas PUESDM DIY, 2024 (diolah)

3.2. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Anggaran belanja Urusan Pekerjaan Umum di Pemda DIY Tahun 2023 sebesar Rp430.972.487.276,00 dengan realisasi sebesar Rp412.061.697.226,00 (95,61%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan kegiatan:
 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan kegiatan:
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
- c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, dengan kegiatan:
 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan kegiatan:
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
- e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dengan kegiatan:
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota dan Kawasan Strategis Provinsi
- f. Program Penyelenggaraan Jalan, dengan kegiatan:
 - Penyelenggaraan Jalan Provinsi
- g. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan kegiatan:
 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
- h. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang, dengan kegiatan:
 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

3.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum di Pemda DIY Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Masih tingginya kebocoran di masing-masing PDAM;
- b. Pengelolaan SPAMDES akibat Sistem yang tidak berjalan akibat sistem yang rusak, tidak adanya pengelola, atau keterbatasan air baku akibat musim kemarau;
- c. Pendanaan untuk penyelenggaraan air minum di kabupaten/kota terkait investasi hilir berupa jaringan servis dan SR masih terbatas.
- d. Untuk peningkatan akses sanitasi layak masih ada beberapa masyarakat yang belum menyadari untuk membangun tangki septik yang sesuai dengan standar teknis
- e. Untuk meningkatkan akses aman masih terdapat keterbatasan sebagai berikut:
- f. terbatasnya anggaran kabupaten kota dalam pembiayaan penambahan sambungan rumah IPAL Sewon
- g. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana (mobil sedot tinja kurang)
- h. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul belum mempunyai IPLT serta IPLT Banyuroto Kulon Progo belum optimal
- i. kesadaran masyarakat dalam mengurus tangki septiknya
- j. Pelaksanaan Penanganan Jalan dalam satu wilayah yang berbarengan dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Kabupaten
- k. Meningkatnya beban volume lalu lintas yang melintasi ruas jalan provinsi - Dilalui kendaraan pengangkut material tambang sehingga membuat beberapa jalan provinsi lebih cepat mengalami kerusakan
- l. Perlunya peningkatan Server dari Web Klinik Konstruksi dikarenakan server merupakan server bersama dari Dinas Kominfo, sehingga server terkadang mengalami gangguan.
- m. Perlu penambahan jumlah alat pengujian, sehingga proses pengujian lebih efisien

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang diperoleh oleh Pemda DIY pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di DIY Tahun 2022-2023

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Tidak ada bencana	Tidak ada bencana
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Tidak ada relokasi program Pemerintah Provinsi	100 %
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	100 %	8,19 %
4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100 %	50,66 %

Sumber: Dinas PUESDM DIY, 2024 (diolah)

4.2. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Anggaran belanja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Pemda DIY Tahun 2023 sebesar Rp131.074.923.200,00 dengan realisasi sebesar Rp119.228.360.221,00 (94,35%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan:
 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
 - Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
- b. Program Kawasan Permukiman, dengan kegiatan:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan Kesehatan 15 (Lima Belas) Ha
- c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dengan kegiatan:
 - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

4.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Pemda DIY Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya insentif/skema untuk mengembangkan hunian Vertikal di perkotaan vertikal untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun masyarakat miskin;
- b. Harga lahan yang mahal untuk pembangunan perumahan MBR dan masyarakat miskin;
- c. Pendataan RTLH yang kurang terpadu, terintegrasi, dan tersinergi antara Pusat (Balai), Provinsi, Kabupaten / Kota, serta swasta yang menyebabkan sulitnya dilakukan pendataan yang akurat dan valid;
- d. Peningkatan kualitas pada setiap kriteria kawasan kumuh di Kab/Kota tidak terintegrasi sehingga menyebabkan tidak tuntasnya penanganan di suatu lokasi;
- e. Pengukuran keberhasilan pembangunan PSU Permukiman di desa belum dapat diukur dengan baik.

5. URUSAN SOSIAL

5.1. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh oleh Pemda DIY pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi Kinerja Urusan Sosial di DIY Tahun 2022-2023

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%
2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%
4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2024 (diolah)

5.2. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja urusan sosial di Pemda DIY Tahun 2023 sebesar Rp85.353.854.838,00 (97,77%) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- a. Program Pemberdayaan Sosial, dengan kegiatan:
 - Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, dengan kegiatan:
 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
- c. Program Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan:
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
 - Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan:
 - Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
- e. Program Penanganan Bencana, dengan kegiatan:
 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

5.3. Permasalahan Yang Dihadapi

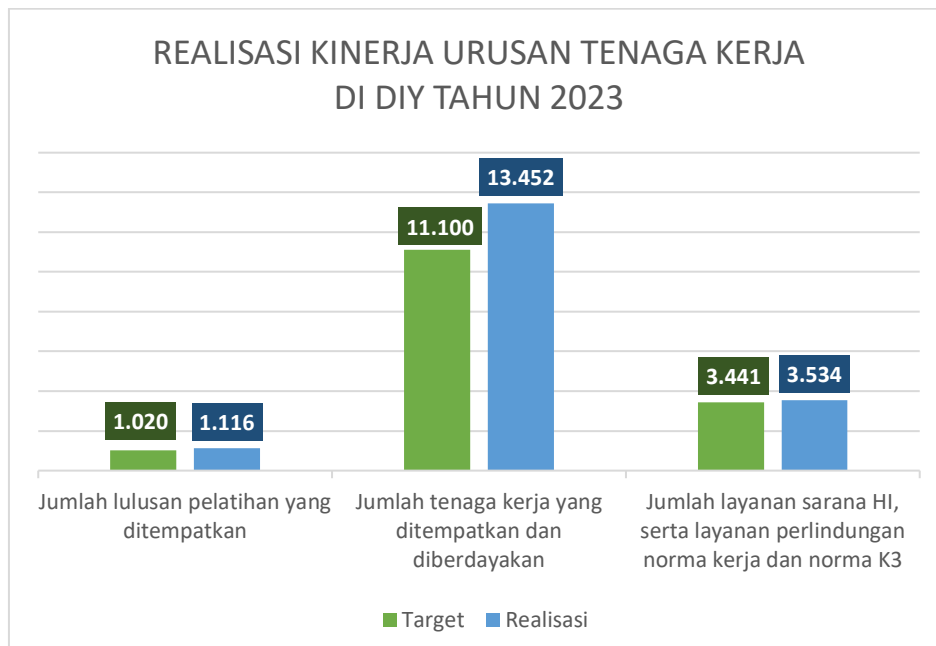
Permasalahan yang dihadapi untuk urusan sosial di Pemda DIY Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Berkembangnya permasalahan sosial dan terbatasnya akses jangkauan yang bisa dilakukan oleh Dinas Sosial DIY.
- b. Permasalahan kenakalan remaja atau anak sekolah yang telah menjurus ke tindakan kriminalitas.
- c. Isu perubahan iklim berpengaruh terhadap ketahanan pangan yang berdampak pada kerentanan sosial. Masyarakat miskin semakin sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

C. RINGKASAN CAPAIAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. URUSAN TENAGA KERJA

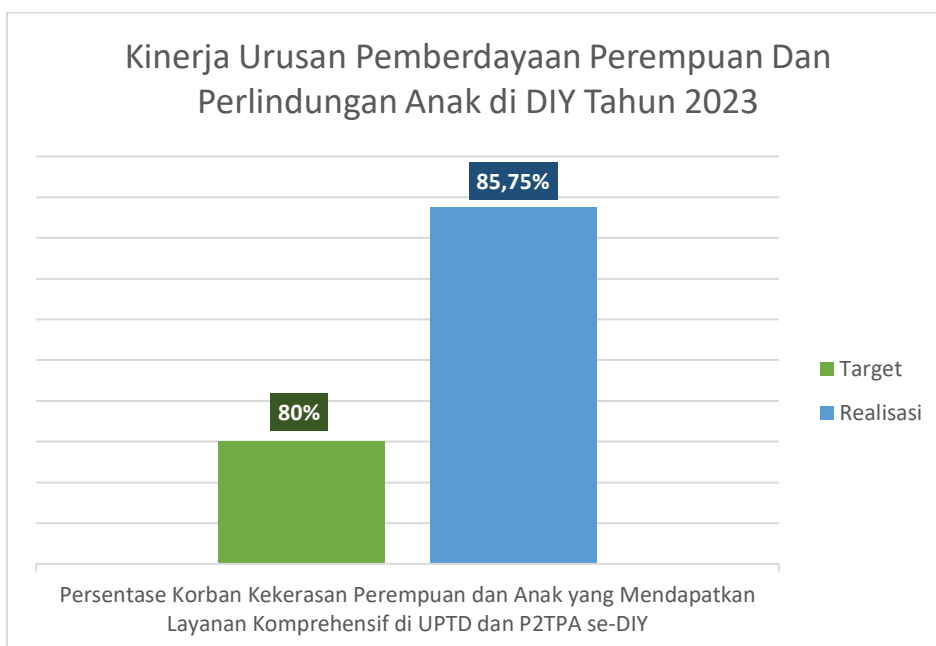
Capaian kinerja urusan tenaga kerja yang diperoleh pada tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan, dan jumlah layanan sarana Hubungan Industrial serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3 adalah sebagai berikut :



Sumber: Dinas Nakertrans DIY, 2024 (diolah)

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

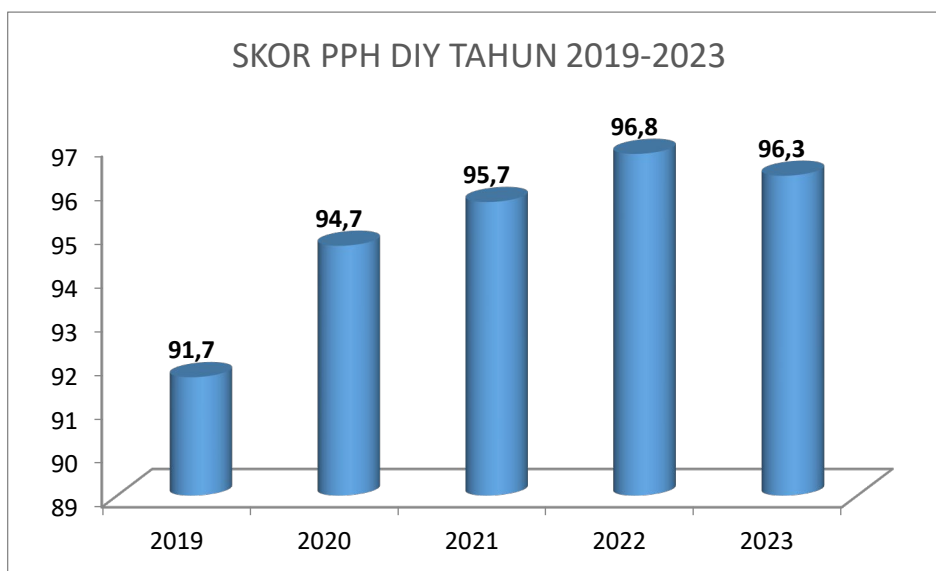
Capaian kinerja urusan tenaga kerja yang diperoleh pada tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja persentase Korban kekerasan Perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA se-DIY adalah sebagai berikut :



Sumber: Dinas DP3AP2 DIY, 2024 (diolah)

3. URUSAN PANGAN

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan parameter penilaian terhadap keseimbangan dan keanekaragaman pangan didasarkan pada komposisi pangan utama. Skor PPH disesuaikan dengan daya terima masyarakat terhadap pangan yang dikonsumsi, untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dan gizi. Skor PPH maksimal bernilai 100. Semakin tinggi Skor PPH suatu wilayah menunjukkan konsumsi masyarakat di wilayah tersebut semakin beragam jenisnya dan semakin bergizi.

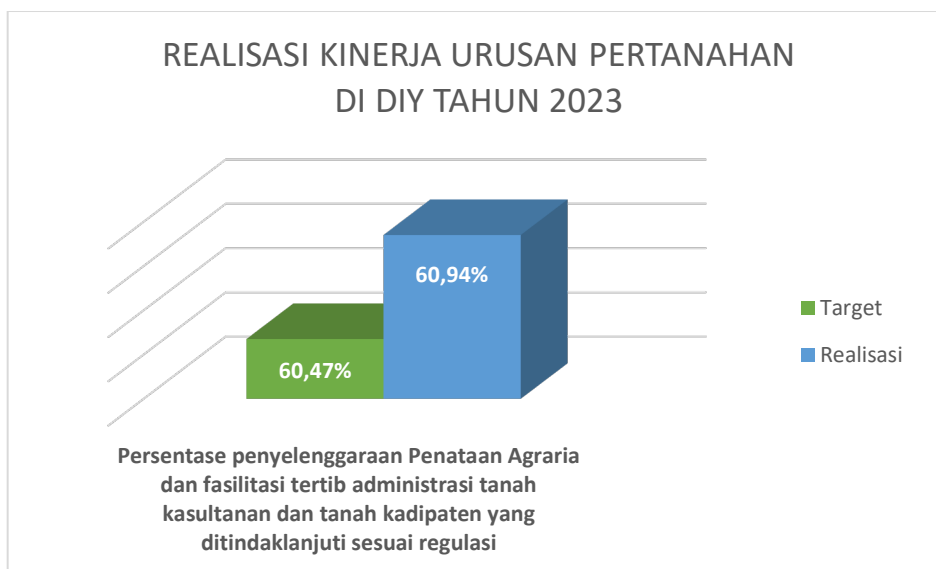


Sumber data: BPS Provinsi DIY diolah oleh DPKP DIY, 2024

Capaian indikator Skor PPH tahun 2023 sebesar 96,3. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 96,8 seolah-olah terjadi penurunan sebesar 0,5 namun hal ini tidak dapat dimaknai bahwa kinerja DPKP DIY menurun di tahun 2023, karena penghitungannya menggunakan Baseline yang berbeda, untuk periode Renstra 2017-2022 menggunakan Baseline Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 kkal/kapita/hari sedangkan untuk Renstra periode 2023-2026 berdasarkan AKE 2.100 kkal/kapita/hari.

4. URUSAN PERTANAHAN

Capaian kinerja urusan pertanahan yang diperoleh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2024

Tabel Data Ijin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah di DIY Tahun 2023

NO	NO. SK IPL	TAHUN	TENTANG
1	235/Kep/2023	2023	Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo Seksi Yogyakarta - Kulon Progo di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
2	378/KEP/2023	2023	Penetapan Lokasi (Penlok) Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi Yogyakarta-Kulon Progo di Kabupaten Kulon Progo

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2024

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Capaian kinerja urusan lingkungan hidup yang diperoleh pada tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup adalah sebagai berikut :



Sumber: DLHK DIY, 2024 (diolah)

Perhitungan IKLH Tahun 2022 dan 2023 telah memperhitungkan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah $IKLH = (IKA\ 0,34) + (IKU\ 0,428) + (IKL\ 0,133) + (IKAL\ 0,099)$.

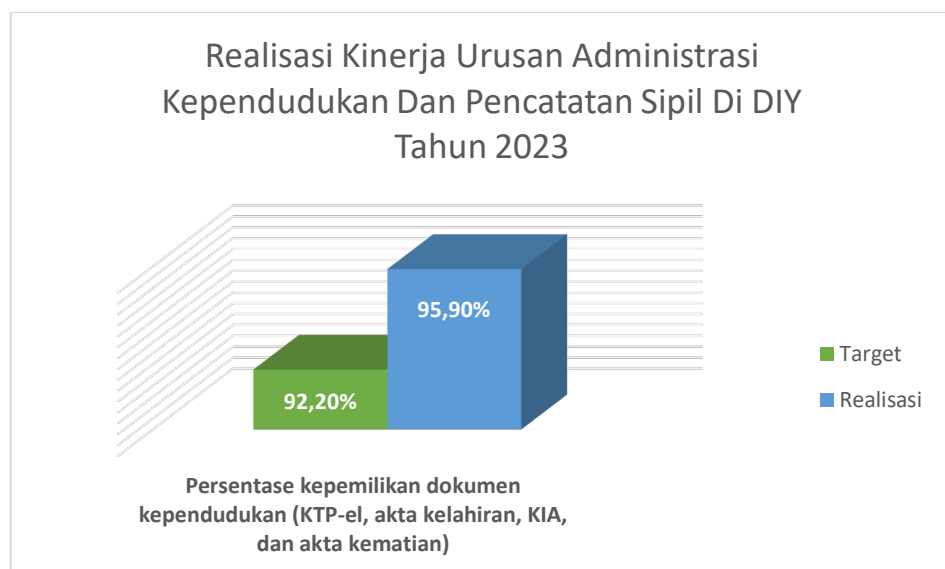
Tabel Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) DIY

NO	KOMPONEN	FORMULA	REALISASI	BOBOT
1	Indeks Kualitas Udara	$100 - [50/0.9 \times (Ieu - 0.1)]$	89,01	0,428
2	Indeks Kualitas Air	$\frac{\sum (\text{setiap kategori status mutu}) * 100}{\sum (\text{status mutu air})}$	40,28	0,34
3	Indeks Kualitas Lahan	$IKL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$	48,68	0,133
4	Indeks Kualitas Air Laut	$WQI = \sum QiWi$	81,11	0,099
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DIY	$(0,428\ IKU + 0,34\ IKA + 0,133\ IKTL + 0,099\ IKAL)$	66,29	1

Sumber: Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Tahun 2023 (diolah)

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diperoleh pada tahun 2023 berdasarkan indikator persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP-el, akta kelahiran, KIA, dan akta kematian) adalah sebagai berikut :

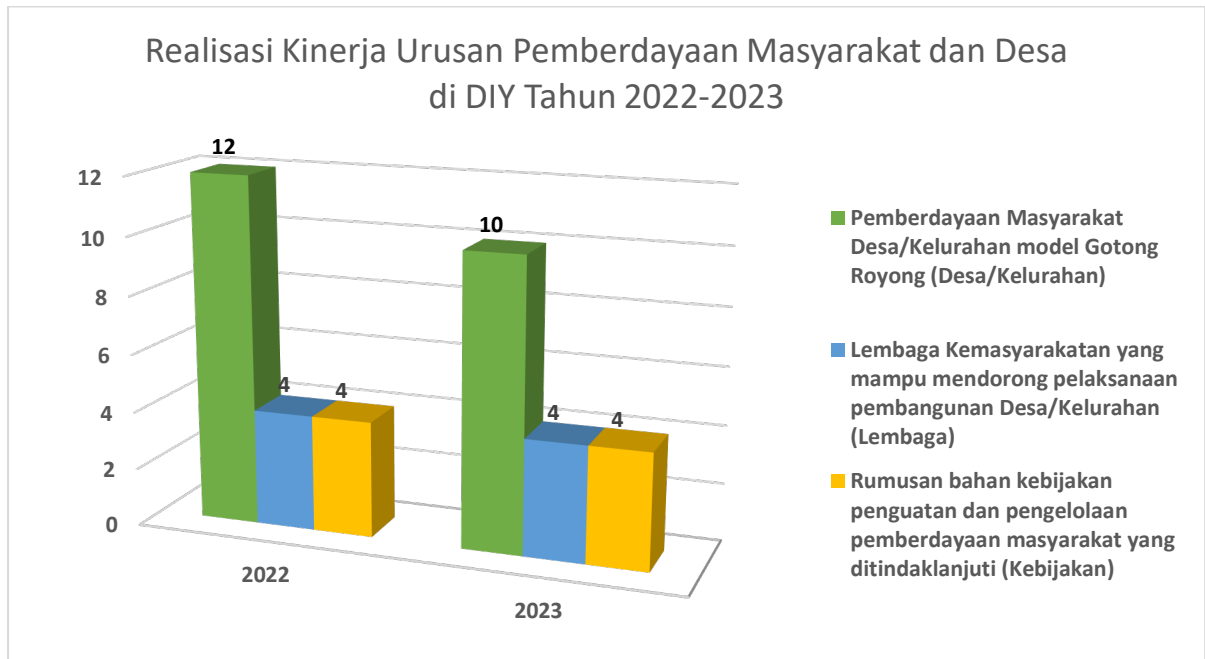


Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2024 (diolah)

7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang diperoleh pada tahun 2023 berdasarkan indikator rumusan bahan kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti, lembaga Kemasyarakatan yang mampu mendorong

pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan, serta pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan model Gotong Royong adalah sebagai berikut :



Sumber: Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY, 2024 (diolah)

Sementara itu ditinjau dari capaian kinerja pemringkatan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020-2023

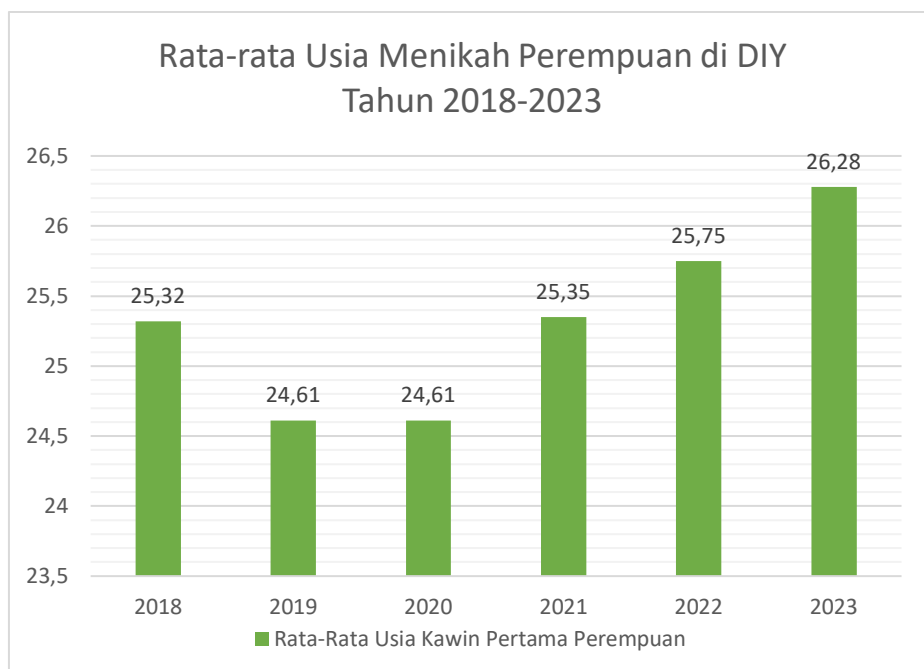
NO	Desa/Kalurahan	Kabupaten	Peringkat
Penetapan Tahun 2020			
1	Bejiharjo	Gunungkidul	Utama
2	Pagerharjo	Kulon Progo	Utama
3	Putat	Gunungkidul	Utama
4	Pandowoharjo	Sleman	Utama
5	Girikerto	Sleman	Utama
6	Wedomartani	Sleman	Utama
7	Sabdodadi	Bantul	Utama
8	Jatimulyo	Kulon Progo	Madya
9	Margodadi	Sleman	Madya
10	Bangunkerto	Sleman	Madya
Penetapan Tahun 2021			
1	Tuksono	Kulon Progo	Utama
2	Banjarharjo	Kulon Progo	Madya
3	Jerukwudel	Gunungkidul	Madya
4	Tanjungharjo	Kulon Progo	Madya
5	Hargomulyo	Kulon Progo	Madya

NO	Desa/Kalurahan	Kabupaten	Peringkat
6	Bangunjiwo	Bantul	Madya
7	Giring	Gunungkidul	Madya
8	Glagah	Kulon Progo	Madya
Penetapan Tahun 2022			
1	Panggunharjo	Bantul	Utama
2	Gilangharjo	Bantul	Utama
3	Kemadang	Gunungkidul	Utama
4	Sinduharjo	Sleman	Utama
5	Sendangmulyo	Sleman	Utama
6	Semanu	Gunungkidul	Utama
7	Trimurti	Bantul	Utama
Penetapan Tahun 2023			
1	Mulyodadi	Bantul	Utama
2	Kepek	Gunungkidul	Utama
3	Srigading	Bantul	Madya
4	Katongan	Gunungkidul	Madya
5	Argomulyo	Sleman	Madya
6	Giripurwo	Gunungkidul	Madya
7	Sidorejo	Kulon Progo	Madya

Sumber : Biro Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda DIY, 2024 (diolah)

8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (KB)

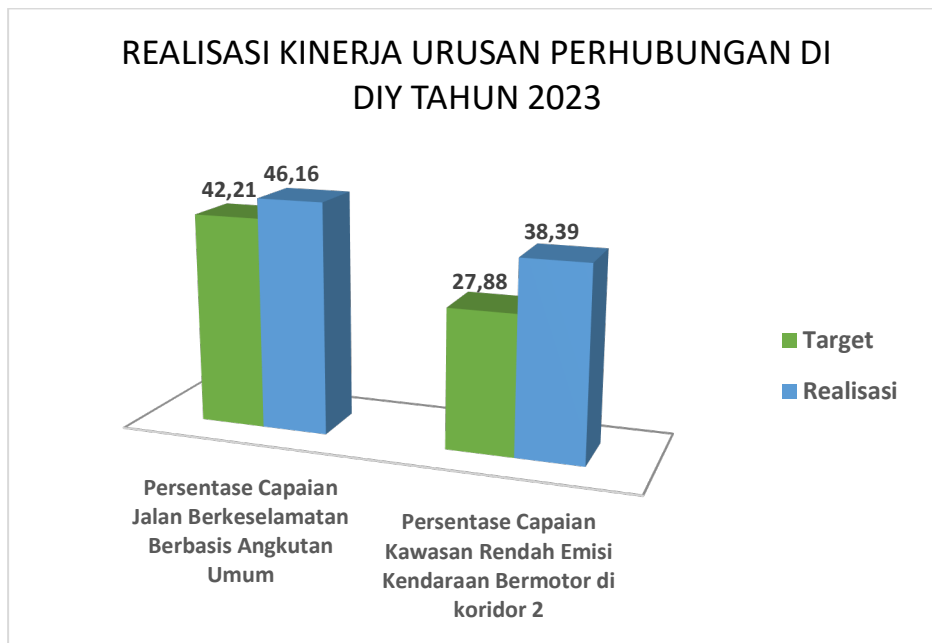
Kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan indikator sasaran rata-rata usia perkawinan yaitu usia 21-30 sehingga target pada tahun 2023 telah tercapai.



Sumber: DP3AP2 DIY, 2024 (diolah)

9. URUSAN PERHUBUNGAN

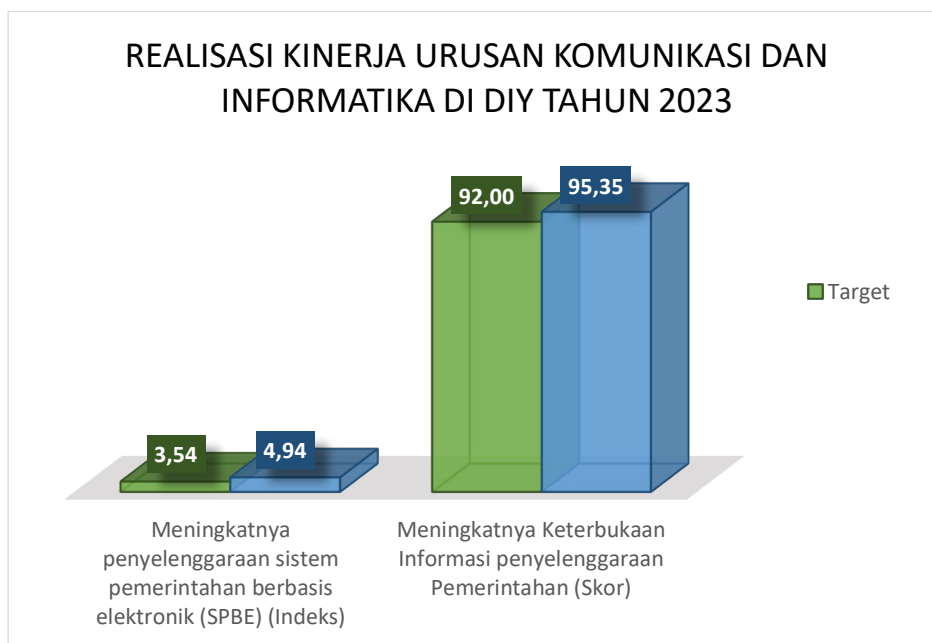
Capaian kinerja urusan perhubungan yang diperoleh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2024 (diolah)

10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2024 (diolah)

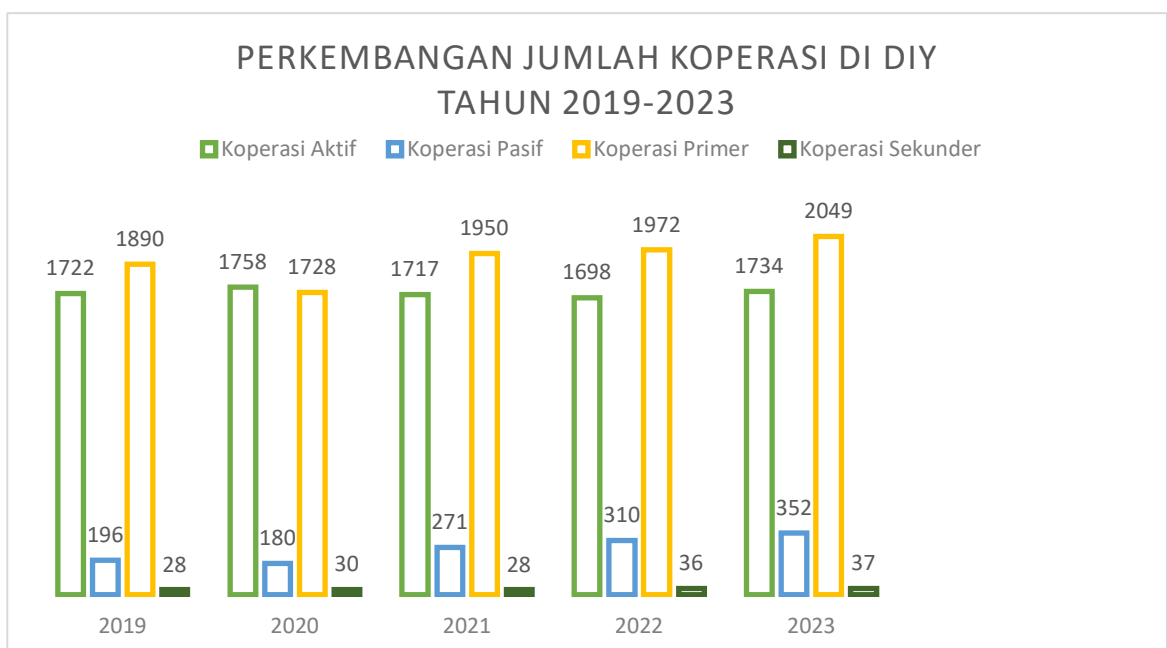
11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Capaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel Realisasi Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di DIY Tahun 2023

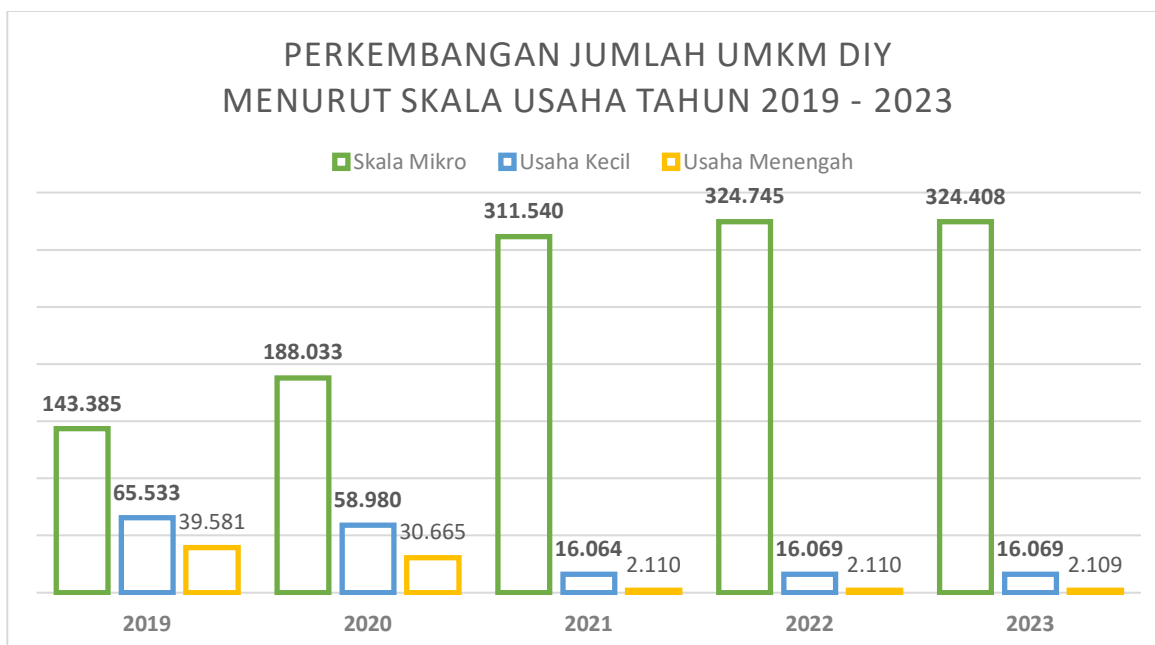
NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Realisasi (%)
1	Kontribusi koperasi modern terhadap koperasi	%	n/a	3,5	3,75	107,14
2	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya	UMKM	n/a	1.150	2.006	174,43
3	Kontribusi jumlah wirausaha pemula terhadap jumlah usaha kecil	%	0,4	0,4	0,56	140,00

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM DIY, 2024 (diolah)



Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM DIY, 2024 (diolah)

Dari grafik di atas, koperasi aktif mengalami peningkatan 2,12% bila dibandingkan dengan jumlah di tahun 2022 yang merupakan masa awal bangkit setelah bertahun-tahun dilanda pandemi Covid-19. Tahun 2023 dunia usaha termasuk koperasi sudah kembali beroperasi seperti semula. Namun koperasi pasif juga ikut meningkat dengan rasionya sebesar 13,55% dari tahun 2022. Tahun 2023 ini terjadi dinamika dalam Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Ditemukan beberapa kasus Koperasi di tingkat Nasional disusul dengan kasus-kasus di daerah. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab adanya kebijakan moratorium yang dimulai sejak Februari 2023 sehingga Koperasi tidak bisa mengurus perizinan terkait, khususnya Izin Usaha Simpan Pinjam, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas.



Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM DIY, 2024 (diolah)

Pada tahun 2020-2022 terdapat pertumbuhan jumlah usaha mikro sebagai dampak ikutan dari pandemi. Banyaknya pemutusan hubungan kerja karena operasional terhenti karena pandemi Covid-19 menyebabkan banyak angkatan kerja yang menganggur, sehingga beralih menjadi pelaku usaha. Penurunan jumlah UMKM pada tahun 2023 ini dipengaruhi oleh banyaknya usaha mikro yang tidak bertahan. Pemulihan pasca pandemi Covid-19 sudah berhasil dilalui sehingga kondisi perekonomian semakin stabil. Banyak instansi maupun perusahaan mulai melakukan rekrutmen untuk pemulihan operasional, sehingga banyak pelaku usaha mikro menghentikan usahanya karena diterima bekerja kembali di perusahaan. Sementara itu terdapat penyesuaian jumlah usaha menengah dan usaha kecil yang disebabkan perubahan kebijakan klasifikasi usaha kecil yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

12. URUSAN PENANAMAN MODAL

Capaian kinerja urusan penanaman modal yang diperoleh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Perkembangan Investasi Kumulatif di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2023

Tahun	Investasi PMDN (Rp000)	Investasi PMA (Rp000)	Total Investasi (Rp000)	Growth (Rp000)	Investation Growth
s.d 2018	10.949.163.293	9.126.508.081	20.075.671.374	7.221.697.000	56,18 %
s.d 2019	17.248.001.993	9.345.955.081	26.593.957.074	6.518.285.700	32,47 %
s.d 2020	19.931.377.693	9.485.961.961	29.417.339.654	2.823.382.580	10,62%
s.d 2021	22.692.647.593	9.803.584.510	32.496.232.103	3.078.892.969	10,46 %
s.d 2022	24.967.647.193	11.437.953.245	36.405.600.439	3.909.367.815	12,0%
s.d 2023	29.983.131.093	12.118.877.347	42.102.008.440	5.696.408.001	16%

Sumber: DPMPSTSP DIY, 2024 (diolah)

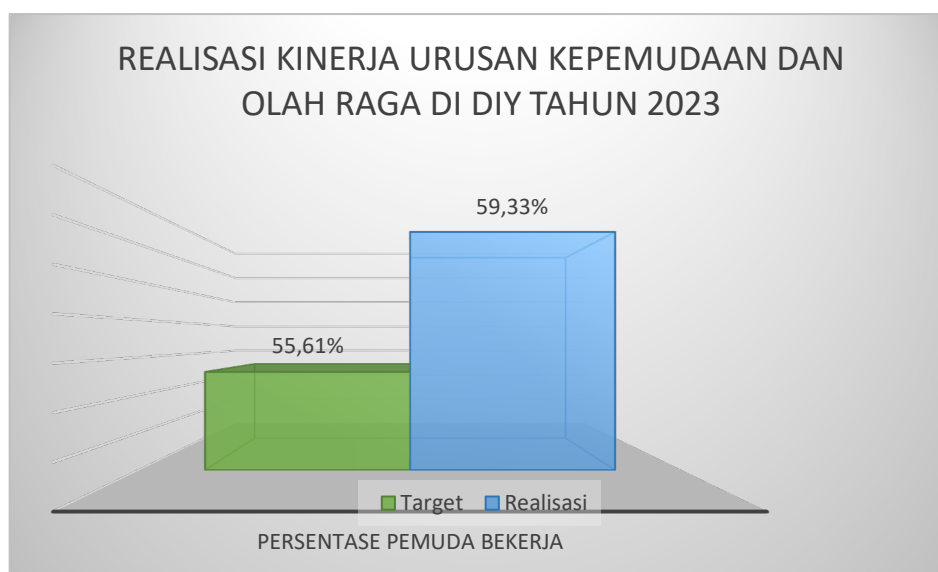
**Tabel Perkembangan Investasi PMA & PMDN Kabupaten/Kota di DIY 2022 – 2023
(dalam rupiah)**

LOKASI	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
	PMDN	PMA	TOTAL	PMDN	PMA	TOTAL
BANTUL	397.605.400.000	88.773.403.066	486.378.803.066	553.435.700.000	133.855.589.576	687.291.289.576
GUNUNG-KIDUL	132.516.700.000	1.308.719.908	133.825.419.908	187.082.600.000	5.181.477.359	192.264.077.359
KULON PROGO	321.437.400.000	17.849.963.441	339.287.363.441	206.704.100.000	35.682.798.531	242.386.898.531
SLEMAN	1.092.765.900.000	253.923.223.431	1.346.689.123.431	3.412.655.100.000	235.331.785.097	3.647.986.885.097
YOGYAKARTA	330.673.600.000	1.272.513.505.210	1.603.187.105.210	655.606.400.000	270.872.450.857	926.478.850.857
TOTAL		3.909.367.815.056			5.696.408.001.422	

Sumber: DPMPSTSP DIY, 2024 (diolah)

13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olah raga yang diperoleh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :



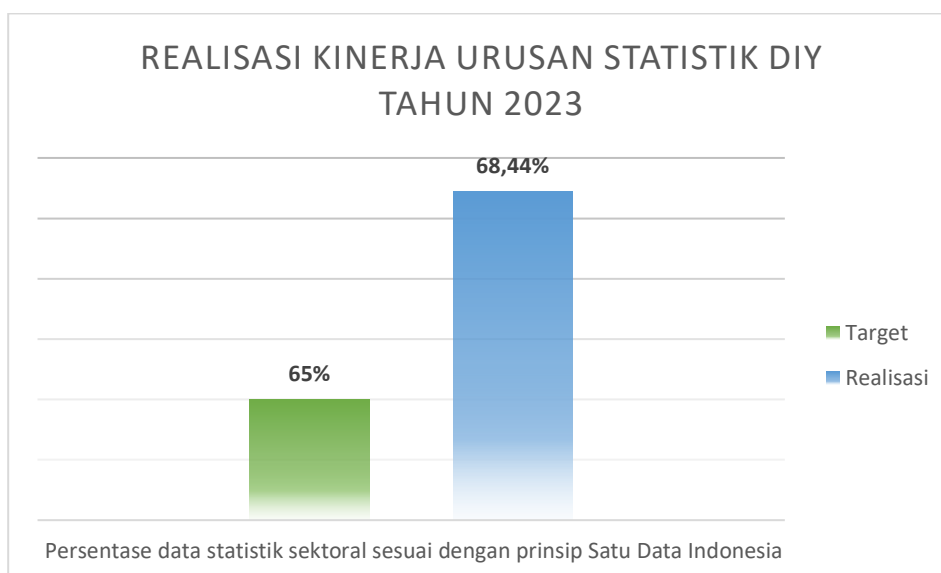
Sumber: Dikpora DIY, 2024

Berdasarkan Statistik Pemuda Indonesia 2023, persentase pemuda bekerja di DIY adalah sebesar 59,33%. Capaian ini diperoleh dari perbandingan jumlah pemuda yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dengan jumlah pemuda dikalikan 100 persen. Terdapat kenaikan capaian sebesar 1,77% dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 57,56% yang menunjukkan kenaikan tingkat partisipasi pemuda baik sebagai pekerja maupun pelaku kewirausahaan.

Untuk jumlah capaian medali pada kejuaraan multievent, DIY memperoleh 59 medali pada kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) yang digelar di Sumatera Selatan pada tanggal 27 Agustus s.d. 3 September 2023. Dalam kejuaraan tersebut kontingen DIY berhasil meraih peringkat ke-5 dengan total raihan medali sebanyak 59 medali yang terdiri dari 19 medali emas, 17 medali perak, dan 23 medali perunggu.

14. URUSAN STATISTIK

Capaian kinerja urusan statistik yang diperoleh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Sumber: Bappeda DIY, 2024

15. URUSAN PERSANDIAN

Capaian kinerja urusan persandian yang diperoleh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi Kinerja Urusan Persandian di DIY Tahun 2023

NO	JENIS PENILAIAN	RUANG LINGKUP	HASIL PENILAIAN
1	Penilaian Indeks Keamanan Informasi (2023)	Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja Keamanan Informasi, Pengelolaan Aset, Teknologi dan Keamanan Informasi	Total score 635 dari maksimum score 645 (Tata Kelola IV; Pengelolaan Risiko III; Kerangka Kerja Keamanan Informasi V; Pengelolaan Aset III; Teknologi dan Keamanan Informasi IV)
2	Penilaian Maturitas Keamanan Siber (2023)	Aspek Tata Kelola, Identifikasi, Proteksi, Deteksi, Respon	4,53 (Level Kematangan Tingkat V (Optimized) dari V)

Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2024

16. URUSAN KEBUDAYAAN

Capaian kinerja urusan kebudayaan yang diperoleh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan di DIY Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022	TAHUN 2023
I	Budaya Benda Yang Dikelola dan Dilestarikan		
1	Struktur	0	74
2	Situs	14	74
3	Benda Cagar Budaya	240	268

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022	TAHUN 2023
4	Bangunan Cagar Budaya	572	458
5	Kawasan Cagar Budaya	1	11
	Jumlah	827	884
II	Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya Dan Museum		
1	Even Sejarah	8	3
2	Peristiwa Sejarah	5	4
3	Komunitas sejarah	4	5
4	Even Bahasa	19	19
5	Naskah Kuno	2	0
6	Registrasi Museum	5	2
7	Even Museum	9	16
8	Peristiwa Sejarah	10	0
9	Tokoh Sejarah	5	0
	Jumlah	67	49
III	Pengembangan Kinerja Pengembangan Seni dan Budaya		
1	Lembaga Budaya dikembangkan melalui Peningkatan Sarpras	n/a	75
2	Lembaga Budaya yang dikembangkan melalui penguatan Lembaga budaya	n/a	14
3	Lembaga Budaya yang dikembangkan melalui kemitraan	n/a	6
4	Lembaga Budaya yang dikembangkan melalui Fasilitasi Upacara Adat (Desa Budaya)	n/a	76
5	lembaga budaya yang dikembangkan melalui Penyelenggaraan Even Penggiat seni	n/a	204
	Jumlah	n/a	375

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2024 (diolah)

17. URUSAN PERPUSTAKAAN

Capaian kinerja urusan perpustakaan yang diperoleh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Sumber: DPAD DIY, 2024 (diolah)

18. URUSAN KEARSIPAN

Capaian kinerja urusan kearsipan yang diperoleh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Sumber: DPAD DIY, 2024 (diolah)

D. RINGKASAN CAPAIAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

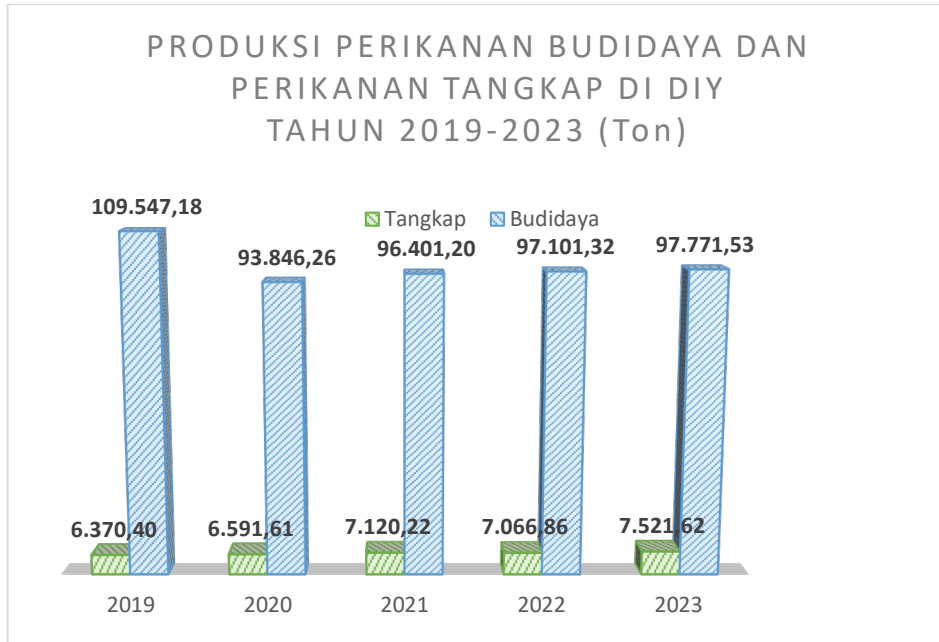
1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan yang diperoleh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 24. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2023 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai produksi perikanan budidaya dan tangkap	juta rupiah	2.270.188	2.276.954	2.715.387	119,26	2.329.580	116,56
	produksi perikanan budidaya	ton	97.101	97.446,00	97.771,53	100,33	98.200	99,56
	produksi perikanan tangkap	ton	7.066	7.188,00	7.521,62	104,64	7.754	97,03
	Tingkat konsumsi ikan masyarakat	Kg/kapita /tahun	34.74	32,70	32,70	100,00	35,00	93,42
	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi	persen	88,20	90	90	100	90	100
2	Persentase status pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan	persen	N/A	25	25	100	100	100
	Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola	persen	N/A	33	33	100	100	33
	Menurunnya persentase pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	persen	10	10	10	100	10	100

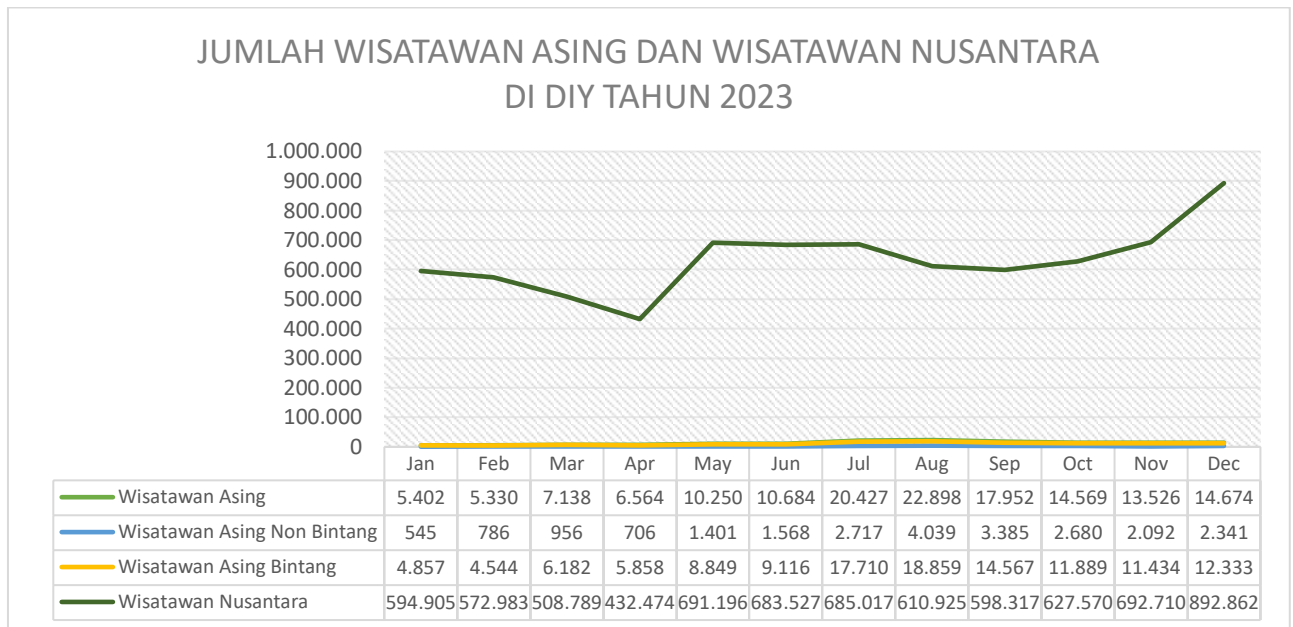
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2024 (diolah)



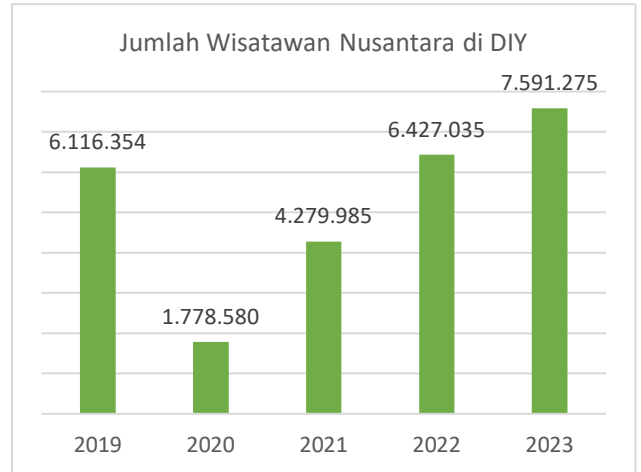
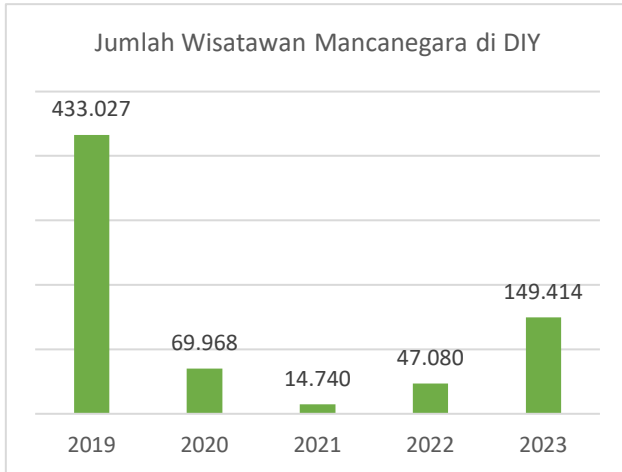
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2024 (diolah)

2. URUSAN PARIWISATA

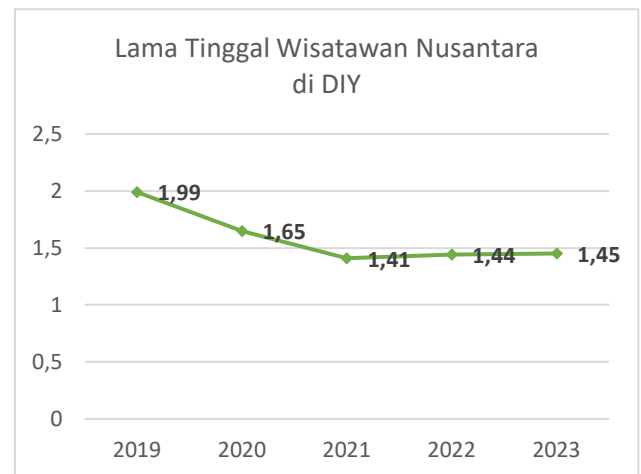
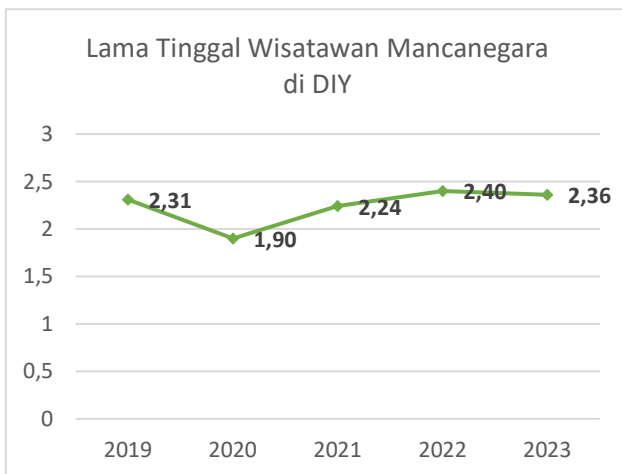
Capaian kinerja urusan pariwisata yang diperoleh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Sumber: BPS DIY Tahun 2024 (data diolah)



Sumber: Dinas Pariwisata DIY & BPS DIY, 2024 (data diolah)



Sumber: Dinas Pariwisata DIY & BPS DIY, 2024 (data diolah)

3. URUSAN PERTANIAN

Capaian kinerja urusan pertanian yang diperoleh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2022-2023

No	Komoditas	Produksi (ton)	
		2021	2022
1	Padi	561.699	535.714
2	Jagung	349.465	362.236
3	Kedelai	6.956	10.306
4	Kacang Tanah	71.421	76.159
5	Kacang Hijau	614	467
6	Ubi Kayu	1.054.322	1.062.333
7	Ubi Jalar	2.360	3.831

No	Komoditas	Produksi (ton)	
		2021	2022
8	Shorgum	0	45

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2024

Tabel Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2022-2023

No	Komoditas	Produksi (Ton)		% Peningkatan/ Penurunan
		2022	2023	
1	Cabai besar	17.193,91	24.236,62	40,96
2	Cabai rawit	151.976,95	214.273,04	40,99
3	Cabai keriting	336.650,74	444.434,92	32,02
4	Bawang merah	223.066,04	330.887,89	48,34
5	Pisang	78.045,27	72.966,90	-6,51
6	Durian	10.656,46	8.849,06	20,42
7	Kelengkeng	17.451,49	18.417,35	5,53
8	Salak	544.980,12	340.364,32	-37,55
9	Anggur	296,54	261,11	-11,95
10	Jahe	4.969,76	4.809,55	-3,22
11	Kencur	2.675,17	2.697,53	0,04

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2024

Tabel Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2022-2023

No	Komoditas	Produksi			Wujud Produksi
		2022	2023	% Pertumbuhan	
1	Kelapa	52.760,76	53.225,62	0,88	kopra
2	Tebu	6.410,79	6.137,39	-4,26	gula hablur
3	Kakao	1.900,72	1.820,66	-4,21	biji kering
4	Cengkeh	658,17	661,02	0,43	bunga kering
5	Tembakau Rakyat	253,55	253,61	0,02	daun kering
6	Kopi	536,65	534,00	-0,49	biji kering
7	Jambu Mete	290,97	280,25	-3,68	biji kering
8	Teh	198,12	151,04	-23,76	daun kering

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2024

Tabel Populasi Ternak Unggulan di DIY Tahun 2022-2023

No	Komoditas	Populasi Ternak			
		2022 (ekor)	2022 (AU)	2023 (ekor)	2023 (AU)
1	Sapi Potong	302.049	229.557	291.805	221.772
2	Sapi Perah	3.265	2.481	3.233	2.457
3	Kerbau	395	359	376	342

No	Komoditas	Populasi Ternak			
		2022 (ekor)	2022 (AU)	2023 (ekor)	2023 (AU)
4	Kuda	1.615	1.114	1.698	1.172
5	Kambing	466.759	51.343	417.512	45.926
6	Domba	140.398	18.252	145.327	18.893
7	Babi	8.869	1.774	8.583	1.717
8	Ayam Buras	3.388.456	67.769	3.584.421	71.688
9	Ayam Ras Petelur	4.700.027	94.001	4.319.144	86.383
10	Ayam Ras Pedaging	6.779.316	135.586	8.120.576	162.412
11	Itik	444.009	13.320	491.692	14.751
TOTAL			615.558		627.512

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2024

4. URUSAN KEHUTANAN

Capaian kinerja urusan kehutanan yang diperoleh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel Hasil Produksi Sektor Kehutanan 2019 - 2023

No	Sub Elemen	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Hasil Hutan Non HPH					
1,1	Kayu Bulat (m3)	63.038,63	2.249,84	2.566,26	2.070,67	2.215,00
1,2	Kayu Gergajian (m3)	6.171,34	3.931,62	2.982,38	2.827,58	3.429,79
1,3	Kayu Olahan (m3)	1.065,12	22.783,69	7.505,71	8.408,87	9.302,31
1,4	Produksi kayu hutan rakyat (m3)	149.278,22	69.085,70	95.420,08	92.158,99	60.553,97
2	Hasil Hutan Ikutan					
2,1	Bambu (batang)	127.330	4.822.205	13.500.256	13.510.000	13.500.000
2,2	Kayu Putih					
2.2.1	Jumlah Produksi Daun (ton)	5.358,25	4.384,75	4.599,00	4.415,00	2.216,5
2.2.2	Jumlah Produksi Minyak (L)	39.323,00	40.353,00	42.317,00	40.160,00	19.529
2.2.3	Jumlah PAD (Rp)	12.487.226.500	9.748.040.000	12.170.672.000	10.550.032.000	44.000.000
3	Luas Lahan Reboisasi					
3,1	Target (ha)	525,00	20,00	30,00	60,00	30,00
3,2	Realisasi (ha)	525,00	20,00	30,00	60,00	30,00
4	Luas Lahan Penghijauan					
4,1	Pembuatan Baru (ha)	574,00	30,00	278,22	375,00	406,00
4,2	Pemeliharaan (ha)	0,00	n/a	30,00	10,00	n/a
5	Industri Pengolahan Hasil Hutan (unit)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00

No	Sub Elemen	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
6	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam (batang)	600.000,00	442.600,00	340.000,00	350.000,00	100.000,00
7	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86,70	85,66	86,68	86,68	86,68

Sumber: DLHK DIY, 2024

Berkurangnya jumlah PAD pada tahun 2023 berasal dari penyesuaian produksi daun dan minyak kayu putih disebabkan karena harga penawaran yang masuk untuk lelang penjualan minyak kayu putih jauh di bawah harga dasar yaitu sebesar Rp.135.000,-/liter dari harga dasar sebesar Rp.220.000,-/liter, sehingga tidak ada penawaran dengan harga yang sesuai. Dengan pertimbangan lemahnya permintaan pasar, dan keamanan penyimpanan minyak kayu putih, maka produksi minyak kayu putih dihentikan dengan jumlah minyak kayu putih sebanyak 19.529 liter. Penjualan minyak kayu putih dilakukan melalui koperasi dengan batas maksimal sebanyak 200 liter dengan harga per liter sebesar Rp.220.000,-. Selain itu, terdapat penurunan di beberapa elemen produksi sektor kehutanan dikarenakan masih keterbatasannya infrastruktur dan aksesibilitas pendanaan.

Tabel Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Kehutanan

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Keterangan
1.	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	100%	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) teregistrasi yang memiliki akses legal sebanyak 45 KTH
2.	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	%	0	Pada tahun 2022 tidak terjadi perubahan fungsi hutan negara
3.	Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi	%	6.20%	Akumulasi penanaman 2020-2023

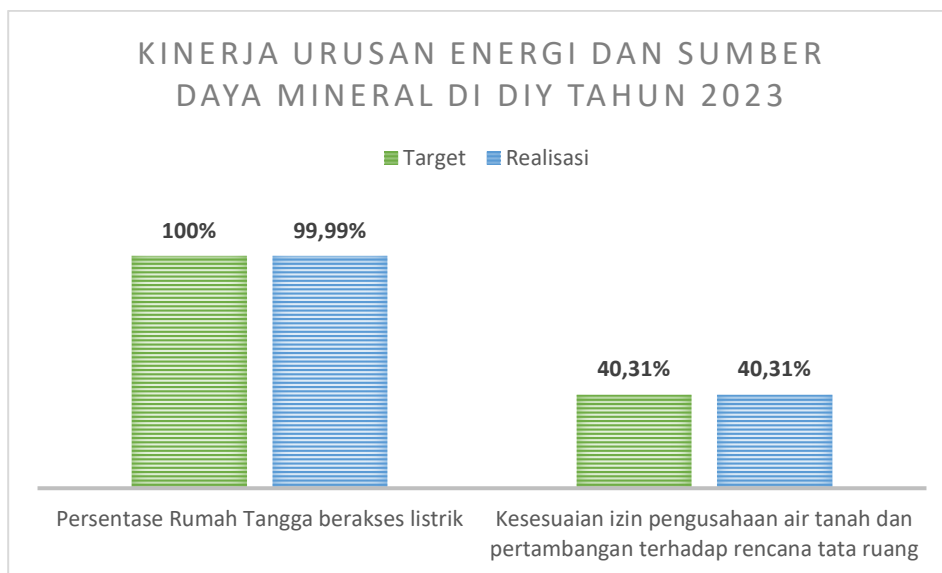
Sumber: DLHK DIY, 2024

Permasalahan yang dihadapi untuk urusan kehutanan di Pemda DIY Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Masih belum optimalnya upaya penanganan lahan kritis dan tingginya alih fungsi lahan.
- Kinerja pengamanan hutan yang masih belum optimal dimana kondisi tegakan hutan di DIY yang merupakan hasil gerakan rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2001-2003 telah cukup memiliki nilai ekonomis sehingga berpotensi rawan pencurian kayu terlebih di masa Pandemi Covid-19.
- Eksistensi hutan rakyat yang tergerus oleh maraknya alih fungsi menjadi lahan permukiman.

5. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

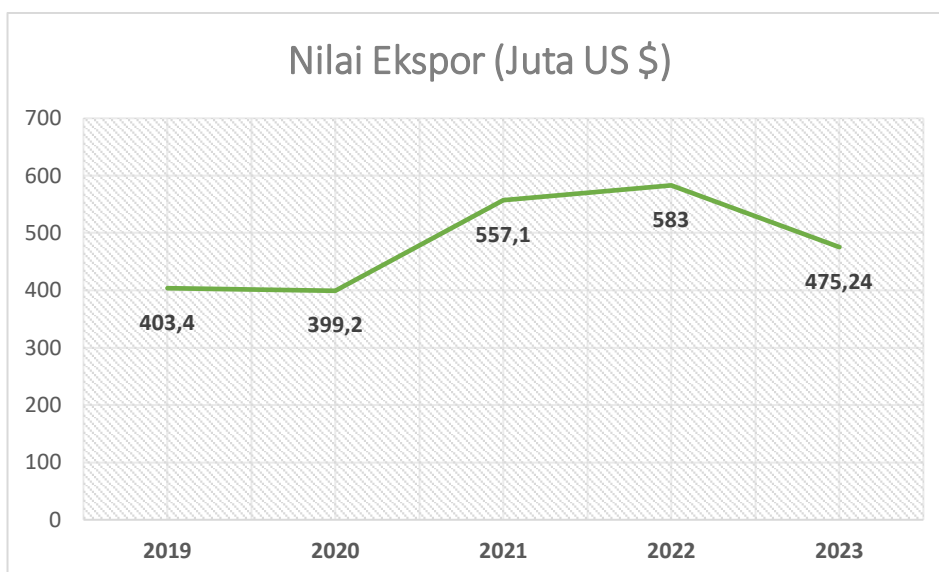
Capaian kinerja urusan energi dan sumber daya mineral yang diperoleh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2024 (diolah)

6. URUSAN PERDAGANGAN

Kinerja sektor perdagangan ditunjukkan dengan peningkatan nilai ekspor. Selama lima tahun terakhir, ekspor DIY menunjukkan tren positif. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai ekspor dari tahun 2019 ke tahun 2023 dengan peningkatan sebesar 17,81%. Nilai Ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 tercatat USD 475.24 Juta atau meningkat sebesar USD 71,84 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pakaian jadi bukan rajutan, perabot, penerangan rumah, barang-barang dari kulit merupakan tiga komoditas dengan kontribusi terbesar selama tahun 2023. Tiga Negara Tujuan Ekspor dengan kontribusi terbesar adalah Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Perkembangan ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dicermati pada tabel berikut:



Sumber: Disperdag DIY, 2024 (diolah)

7. URUSAN PERINDUSTRIAN

Capaian kinerja urusan perindustrian yang diperoleh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

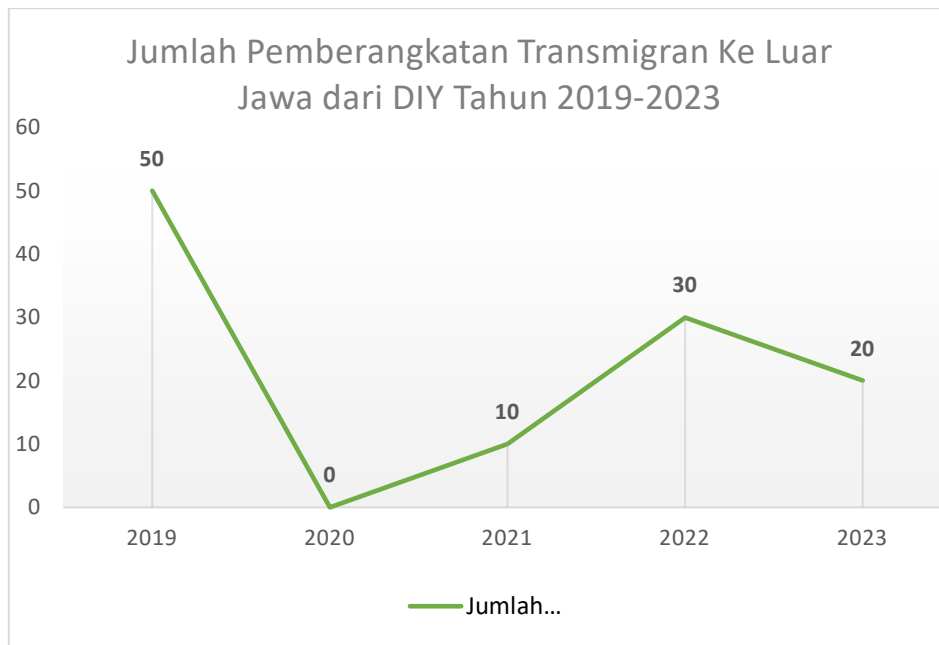
Tabel Perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di DIY Tahun 2019-2023

No.	IKM	2019	2020	2021	2022	2023
1	Unit usaha (UU)	97.013	96.597	96.954	98.408	102.787
2	Tenaga kerja (orang)	360.242	355.319	356.634	361.984	378.092
3	Nilai investasi (Rp Juta)	2.084.560	1.992.422	1.999.794	2.029.791	2.120.117
4	Nilai produksi (Rp Juta)	13.041.848	12.465.398	12.511.520	13.224.676	13.813.174
5	Nilai bahan baku dan penolong (Rp Juta)	7.537.467	7.204.311	7.230.967	7.339.432	7.666.037

Sumber: Disperindag DIY, 2024 (diolah)

8. URUSAN TRANSMIGRASI

Capaian kinerja urusan transmigrasi yang diperoleh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Sumber: Disnakertrans DIY, 2024 (diolah)

E. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD DIY tahun 2023-2026, terdapat 4 sasaran Pemerintah Daerah dengan 10 indikator Sasaran Perangkat Daerah yang menjadi indikator kinerja utama sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan Pemda DIY. Capaian indikator tersebut disajikan sebagai berikut.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Pemda DIY Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2022	Target RPD 2023-2026	Capaian Tahun 2023	Persentase Terhadap RPD 2023-2026	Keterangan Ketercapaian
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Pertumbuhan Ekonomi	%	5.15	5,34	5,07	94,94	Tidak Tercapai
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.06	3,42	3,69	92,11	Tidak Tercapai
		3. Indeks Gini	Indek	0.459	0,423	0,449	93,85	Tidak Tercapai
		4. Indeks Williamson	Indek	0.4504	0,444	0,4831	91,19	Tidak Tercapai
		5. Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indek	59.92 Kurang Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	100	TERCAPAI
2	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Kehidupan Sosial Masyarakat	6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indek	80.64	81,07	81,09	100,02	TERCAPAI
		7. Tingkat Kemiskinan	%	11.49	10,74	11,04	89,19	Tidak Tercapai
3	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	8. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indek	–	74,58	66,52	98.84	Tidak Tercapai
4	Meningkatnya kapasitas tata Kelola pemerintahan	9. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100	TERCAPAI
		10. Nilai AKIP	Nilai Abjad	AA	AA	AA	100	TERCAPAI

Sumber: BAPPEDA DIY, 2024

Berdasarkan tabel realisasi capaian indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama Pemda DIY pada tahun 2023 menunjukkan dari 10 indikator kinerja, terdapat 4 indikator kinerja yang memiliki persentase capaian $\geq 100\%$ terhadap target RPD DIY tahun 2023-2026. Namun, masih terdapat 6 indikator kinerja yang belum tercapai sesuai dengan target. Meskipun demikian, beberapa indikator mengalami peningkatan kinerja dibandingkan capaian tahun 2022. Masih terdapat pekerjaan rumah yang menjadi permasalahan yang belum terselesaikan dan menjadi sorotan di masyarakat yaitu angka kemiskinan dan ketimpangan.

Dari total 4 indikator yang telah tercapai, atau ketercapaiannya sama atau bahkan lebih dari 100% yaitu: 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 3) Opini BPK dan 4) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Dari total 6 indikator yang belum tercapai atau tingkat capaiannya berada pada aras <100% yaitu: 1) Pertumbuhan Ekonomi, 2) Tingkat Pengangguran Terbuka, 3) Indeks Gini, 4) Indeks Williamson, 5) Tingkat Kemiskinan, dan 6) Indeks Pembangunan Kebudayaan. Dampak dari pandemi masih berpengaruh terhadap capaian kinerja, keenam indikator yang realisasinya belum sesuai target tersebut, selanjutnya perlu menjadi fokus Pemda DIY untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tahun berikutnya. Uraian pencapaian dari masing-masing IKU Pemda DIY sebagaimana tersebut di atas, diinformasikan sebagai berikut.

F. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun sebelumnya

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 3,62 dan status kinerja tinggi (peringkat ke-2 Nasional).
- b. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 3,53 dan status kinerja tinggi (peringkat ke-5 Nasional).

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Nomor 12A/LHP/XVIII.YOG/04/2023 Pemda DIY berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY Tahun 2022 yang berarti telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk yang **ketigabelas** kalinya.

G. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	5.855.271.928.290,00	5.840.561.001.091,65	99,75	5.531.194.851.402,30
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.368.708.585.703,00	2.368.679.166.252,65	100	2.263.431.316.669,58
4.1.01	Pajak Daerah	2.088.941.497.868,00	2.069.612.267.000,57	99,07	1.951.267.446.232,85
4.1.02	Retribusi Daerah	33.564.359.756,00	33.213.267.052,00	98,95	38.249.563.473,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	109.070.217.574,00	109.790.680.460,56	100,66	108.239.513.315,87
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	137.132.510.505,00	156.062.951.739,52	113,8	165.674.793.647,86
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.368.708.585.703,00	2.368.679.166.252,65	100	2.263.431.316.669,58
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.478.957.842.587,00	3.463.926.176.823,00	99,57	3.257.721.489.974,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.478.121.936.167,00	3.463.090.270.403,00	99,57	3.256.850.196.484,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	835.906.420,00	835.906.420,00	100	871.293.490,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.605.500.000,00	7.955.658.016,00	104,6	10.042.044.758,72
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.605.500.000,00	7.950.630.000,00	104,54	7.484.595.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	5.028.016,00	0	2.557.449.758,72
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.605.500.000,00	7.955.658.016,00	104,6	10.042.044.758,72
	JUMLAH PENDAPATAN	5.855.271.928.290,00	5.840.561.001.091,65	99,75	5.531.194.851.402,30
5	BELANJA DAERAH	6.016.543.491.245,00	5.708.080.855.492,41	94,87	5.449.935.625.661,56
5.1	BELANJA OPERASI	3.721.718.798.489,00	3.506.378.070.981,20	94,21	3.445.986.585.280,31
5.1.01	Belanja Pegawai	1.632.174.635.343,00	1.572.346.950.277,00	96,33	1.604.664.380.912,64
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.370.269.758.830,00	1.246.181.407.244,20	90,94	1.265.180.025.505,94
5.1.04	Belanja Subsidi	85.553.295.477,00	75.470.221.902,00	88,21	70.269.681.385,00
5.1.05	Belanja Hibah	604.259.784.839,00	584.093.037.626,00	96,66	474.277.634.446,73
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	29.461.324.000,00	28.286.453.932,00	96,01	31.594.863.030,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.721.718.798.489,00	3.506.378.070.981,20	94,21	3.445.986.585.280,31
5.2	BELANJA MODAL	787.127.650.315,00	745.400.266.545,00	94,7	704.882.049.066,74
5.2.01	Belanja Modal Tanah	177.970.845.828,00	169.306.929.192,00	95,13	152.171.680.772,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	193.623.864.205,00	186.112.683.018,00	96,12	174.540.050.841,74
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.710.000.225,00	150.930.255.820,00	90,53	210.446.091.623,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	234.751.635.170,00	225.450.247.009,00	96,04	153.970.963.843,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.896.669.487,00	13.437.651.506,00	96,7	13.753.261.987,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	174.635.400,00	162.500.000,00	93,05	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	787.127.650.315,00	745.400.266.545,00	94,7	704.882.049.066,74
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.998.129.613,00	198.487.268,00	0,9	5.735.041.553,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	21.998.129.613,00	198.487.268,00	0,9	5.735.041.553,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	21.998.129.613,00	198.487.268,00	0,9	5.735.041.553,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.485.698.912.828,00	1.456.104.030.698,21	98,01	1.293.331.949.761,51
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	904.030.830.780,00	886.411.063.641,00	98,05	839.016.298.042,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	581.668.082.048,00	569.692.967.057,21	97,94	454.315.651.719,51
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	1.485.698.912.828,00	1.456.104.030.698,21	98,01	1.293.331.949.761,51
	JUMLAH BELANJA	6.016.543.491.245,00	5.708.080.855.492,41	94,87	5.449.935.625.661,56
	SURPLUS/DEFISIT	-161.271.562.955,00	132.480.145.599,24	-82,15	81.259.225.740,74
6	PEMBIAYAAN DAERAH	161.271.562.955,00	160.555.386.955,24	99,56	381.012.337.214,50
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	466.271.562.955,00	465.555.386.955,24	99,85	554.687.337.214,50
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	462.271.562.955,00	462.271.562.955,24	100	554.487.394.414,50
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000,00	3.283.824.000,00	82,1	199.942.800,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	466.271.562.955,00	465.555.386.955,24	99,85	554.687.337.214,50
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	305.000.000.000,00	305.000.000.000,00	100	173.675.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	100	173.675.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	305.000.000.000,00	305.000.000.000,00	100	173.675.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	161.271.562.955,00	160.555.386.955,24	99,56	381.012.337.214,50
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	293.035.532.554,48	0	462.271.562.955,24

Sumber: BPKA DIY, 2024 (Unaudited)

H. INOVASI DAERAH

Rincian inovasi daerah yang memenuhi syarat kematangan untuk diikuti dalam *Innovative Government Adward* (IGA) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Aplikasi Usul Kenaikan Pangkat (APLUS KINANGKAT). Aplikasi ini sangat memudahkan baik user/pengguna ASN yang naik pangkat maupun verifikasi dan validasi data oleh BKD DIY.
2. Penggunaan *Learning Management System* dengan nama *vigara.mediadidik.com*. Tujuan penerapan aplikasi ini untuk memberikan ruang belajar bagi siswa melalui tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh.
3. Inovasi Kontak Online Admin Samsat Kulon Progo (TAKON AKU). Terobosan baru SAMSAT Kulon Progo untuk memudahkan masyarakat dalam berinteraksi, konsultasi dan tanya jawab secara online dengan SAMSAT Kulon Progo.
4. Jempol Si Panda (Jemput Bola Potensi Pajak Kendaraan Bermotor). Terobosan pendataan dan penagihan potensi pajak kendaraan bermotor melalui pendataan dan penagihan melalui *whatsaap*, bekerja sama dengan Kantor Pos Kabupaten Bantul, dan melakukan pendataan dan penagihan secara *door to door*.
5. Sasadhara (Sarana Sawiji Advokasi Hubungan Industrial). Penerapan inovasi ini untuk memberikan kemudahan akses kepada tenaga kerja yang akan menyampaikan pengaduan ketenagakerjaan, mempersingkat birokrasi dan penyelesaian aduan, serta mempermudah monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengaduan.
6. Manunggal Raharja. Merupakan instrumen koordinasi dan komunikasi terkait data kemiskinan dengan stakeholder terkait, kesepakatan *sharing* data, validasi berbasis digital untuk Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang menghasilkan validitas data penerima layanan kesejahteraan sosial, pelayanan kesejahteraan sosial di DIY.
7. Grhasia Siap Angkat Orang Dengan Gangguan Jiwa (Grhasia Sadewa). Melalui aplikasi ini masyarakat/keluarga dapat langsung menyampaikan permohonan penjemputan dan menginformasikan tag lokasi pada map yang disediakan untuk kemudian dilakukan supervisi dan verifikasi.
8. Aplikasi E-Office Sisminkada. Merupakan sistem jaringan komputer kearsipan yang menghubungkan unit kearsipan dengan unit pengolah di lingkungan Setda DIY. Sarana ini akan menunjang pengurusan naskah dinas yang diintegrasikan dalam satu kesatuan sistem manajemen informasi sehingga dapat diakses dan disajikan dengan lebih cepat dan akurat.
9. Sistem Informasi Kalurahan (SINKAL). SINKAL merupakan instrumen pembinaan dan pengawasan 392 Kalurahan di DIY dengan menghimpun data primer dari Kalurahan utamanya profil dan kinerja tata kelola pemerintahannya. Salah satu kelebihan dari SINKAL ini adalah sudah terintegrasikan dengan Quick Response Code yang terpasang pada papan nama setiap kalurahan di DIY. Ketika gawai kita arahkan untuk memindai QR Code tersebut akan langsung terhubung ke aplikasi dan menampilkan data kalurahan yang bersangkutan.
10. Bapelkes e-Learning System (BEST). Inovasi media dan sarana pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk *learning management system* yang merupakan perangkat lunak untuk membuat materi pembelajaran pelatihan, mengelola kegiatan pembelajaran serta hasil-hasilnya, memfasilitasi interaksi, komunikasi, kerja sama antara panitia, fasilitator, narasumber, pengendali pelatihan dan peserta pelatihan.
11. PESONA TERAS (Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik Tenant dan Masyarakat). Inovasi pengelolaan sampah yang dilakukan dengan cara melibatkan para *tenant* dan *cleaning* untuk mewujudkan Teras Malioboro sebagai lingkungan minim sampah (*Zero Waste*).
12. INFOSAKU (Informasi Masa Berlaku) yang merupakan sebuah layanan unggulan yang dimiliki oleh KPPD DIY di Kabupaten Sleman dengan memberikan pesan pengingat kepada wajib pajak terkait masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang akan segera berakhir.
13. E-SPPD. Aplikasi E-SPPD mengubah proses pembuatan laporan yang awalnya manual menjadi otomatis secara daring (*online*) sehingga mengurangi risiko ketidakakuratan

laporan, ketidaklengkapan dokumen, serta mempersingkat waktu pembuatan dokumen yang akhirnya mempermudah kelengkapan administrasi pelaporan dan dokumen SPJ penerimaan.

Disamping inovasi daerah, sepanjang tahun 2023 Pemda DIY mendapatkan penghargaan/penilaian secara nasional berkaitan dengan capaian tata kelola pemerintahan, di antaranya adalah:

1. DIY kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DIY tahun 2022, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP LKPD DIY 2022 ini menjadi yang ke-13 kalinya diraih oleh DIY secara berturut-turut.
2. Pada tanggal 29 April 2023, Pemda DIY meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Pemerintah Daerah dengan Status Kinerja Tinggi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2021.
3. Penghargaan *Universal Health Coverage* (UHC) Award Tahun 2023 pada 14 Maret 2023 sebagai salah satu provinsi yang telah berhasil mewujudkan implementasi JKN-KIS di wilayahnya, dengan cakupan kepesertaan mencapai lebih dari 95% dari total penduduk.
4. Penghargaan Provinsi Berkinerja Terbaik untuk wilayah Jawa-Bali pada PPKM Award 2023 . Penghargaan diberikan sebagai apresiasi kinerja dalam mengatasi pandemi *Covid-19*.
5. Pemda DIY meraih penghargaan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Awards 2023 kategori Madya Kemitraan Tingkat Daerah dan kategori Utama Persaingan Usaha Tingkat Daerah Kamis 16 Februari 2023.
6. Pada 6 Maret 2023 DIY dinobatkan sebagai daerah dengan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tertinggi untuk tahun 2022 oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI.
7. Pemda DIY berhasil meraih penghargaan PR Indonesia Awards (PRIA) 2023 pada kategori manajemen krisis dan pasca krisis. Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Sekertaris Umum BPP Perhumas Indonesia, Fardila Rachmilliza Jumat 17 Maret 2023.
8. Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 2023 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan ini diberikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo pada Rakornas Peringatan HUT Ke-73 Satpol PP dan Ke-61 Satlinmas Kamis 02 Maret 2023. Penghargaan Karya Bhakti Satpol PP ini diberikan kepada Satpol PP yang sangat berhasil, kreatif, inovatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
9. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY kembali memperoleh apresiasi sebagai Provinsi Layak Anak (PROVILA) untuk kedua kalinya di tahun 2023. Di tahun 2022 pun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI telah menobatkan DIY sebagai PROVILA.
10. Pemda DIY meraih Penghargaan Provinsi dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) terbaik se-Indonesia dari Badan Pangan Nasional pada Sabtu 12 Agustus 2023.
11. Sri Sultan dianugerahi penghargaan Adhibakti Sanapati oleh BSSN Indonesia. Penghargaan diberikan oleh kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Kamis 08 Juni 2023.
12. Penghargaan Inisiator Kebijakan di Bidang Pembangunan Maritim (Soedarpo Sastrosatomo Award). Penghargaan kategori utama dari Maritime Award 2022-2023 tersebut secara langsung diterima Sri Sultan pada malam penganugerahan Maritime Award 2022-2023 yang digelar Jumat (10/02) di Marina Batavia, Port Sunda Kelapa, DKI Jakarta.
13. BKN Award. Pemda DIY sejak tahun 2021 hingga 2023 berlangganan penghargaan BKN Awards dari Badan Kepegawaian Negara RI. Tahun 2023 ini, sebanyak lima kategori penghargaan pada BKN Award 2023 berhasil diraih. Kategori tersebut yaitu Implementasi Manajemen ASN Terbaik, Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja, Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi dan CAT, Pengembangan Kompetensi, serta Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian. Penghargaan diserahkan pada 22 September 2023 kepada Sri Sultan oleh Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto.

14. Penghargaan Adibhakti Senapati. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memprakarsai berdirinya Museum Sandi bersama Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia pada tahun 2006, Mayjen TNI Nachrowi Ramli. Penghargaan diberikan oleh kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) Hinsa Siburian pada 08 Juni 2023 di Avenzel Hotel and Convention, Bekasi, Jawa Barat.
15. Pada gelaran AMH tahun 2023, Pemda DIY pun berhasil memboyong 4 piala, salah satunya yakni Terbaik ke-1 kategori media sosial, mengungguli provinsi lainnya di Indonesia. Total terdapat 6 kategori yang dilombakan pada AMH 2023. Selain kategori media sosial, Pemda DIY juga meraih penghargaan sebagai terbaik ke-2 kategori kampanye komunikasi publik, terbaik ke-2 kategori penerbitan media internal (*Inhouse Magazine*), dan terbaik ke-3 kategori media *audio visual*.
16. DIY meraih 2 penghargaan Bhumandala Award pada kategori Pemanfaatan Informasi Geospasial, pada kategori provinsi. Penghargaan ini disumbangkan oleh Dispertaru DIY melalui Inovasi Pusat Data Informasi Pengelolaan, Pemanfaatan Geospasial dan BPBD DIY melalui Pengendalian Pertanahan Berbasis Geospasial dan Inovasi Penanggulangan Bencana Melalui Koordinat dan Geolocation. Penghargaan diterima oleh Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik, Sukamto pada Senin, 6 November 2023 di *Ballroom Discovery Kartika Plaza Hotel*, Bali.
17. Langkah sustainable untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat ini telah mengantarkan DIY mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Terbaik pada Indonesia's SDGs Action Awards 2023 dari Bappenas RI. Penghargaan ini diserahkan langsung kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X oleh Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa pada Senin, 06 November 2023 di Royal Ambarukmo Hotel, Yogyakarta, pada acara Konferensi SDGs ke-6 Bappenas RI.
18. DIY berhasil meraih peringkat terbaik ke-2 Anugerah Layanan Investasi 2023 Kategori Pemerintah Daerah Provinsi atas Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada 8 November 2023 di Hotel Sangri-la Jakarta.
19. Pemda DIY menjadi salah satu dari tiga terbaik penerimaan Penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2023, Kategori Terbaik Pemerintah Provinsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) *Birawa Assembly Hall*, Bidakara, Jakarta, pada Selasa, 21 November 2023.
20. Pemda DIY memperoleh empat penghargaan pada Tenaga Kerja (Naker) Award 2023 yang dilaksanakan di Balai Sarbini, Jakarta, 1 Desember 2023. Dalam penganugerahan tersebut Gubernur DIY memperoleh penghargaan bagi kepala daerah, yakni Paramakarya sebagai Pembina Produktivitas Terbaik. Tiga penghargaan lain yang diraih DIY pada Naker Award 2023 ini adalah Indeks Produktivitas Ketenagakerjaan (IPK) Penduduk dan Tenaga Kerja Terbaik, IPK Perencanaan Tenaga Kerja Terbaik, dan IPK Urusan Ketenagakerjaan Sedang Terbaik II.
21. DIY berhasil mempertahankan predikat tertinggi dengan nilai AA pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ke - 6 kalinya di tahun 2023 ini. Predikat AA ini diraih sejak tahun 2018, berturut-turut hingga sekarang, serta masih menjadi satu-satunya dan yang tertinggi di Indonesia. Penghargaan SAKIP ini diserahkan oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, 6 Desember 2023 pada acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI Tahun 2023 di Nusa Dua Convention Center, Bali. Selain Predikat AA pada SAKIP, DIY juga meraih predikat A pada penilaian Reformasi Birokrasi serta Zona Integritas atau ZI. Untuk penilaian Zona Integritas, DIY melalui Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapeljamkesos) DIY, meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), meningkat dari tahun 2022 yang meraih predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK).



29 Apr 2023, Penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Status Kinerja Tinggi



16 Februari 2023, Penghargaan KPPU Awards Kategori Kemitraan dan Persaingan Usaha



20 Maret 2023, Provinsi Berkinerja Terbaik Pada PPKM Award



06 Maret 2023, Nilai IPLM Tertinggi Nasional



11 Februari 2023, Penghargaan Inisiator Kebijakan Kemaritiman



8 Juni 2023, Penghargaan Adhibakti Sanapati oleh BSSN Indonesia



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

jogja
Istimewa

MASIH SATU-SATUNYA DI INDONESIA **DIY RAIH PREDIKAT SAKIP AA KE - 6 KALINYA**



DIY berhasil mempertahankan predikat tertinggi dengan nilai AA pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ke - 6 kalinya di tahun 2023 ini. Predikat AA ini diraih sejak tahun 2018, berturut-turut hingga sekarang, serta masih menjadi satu-satunya dan yang tertinggi di Indonesia.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY Tahun 2023 kami sampaikan dengan harapan akan memperoleh tanggapan serta masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. Kami menyadari masih terdapat program dan kegiatan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, masukan yang bersifat konstruktif senantiasa kami harapkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa program yang telah mencapai hasil optimal merupakan kerja keras semua pihak, baik dari jajaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat. Untuk itu Pemda DIY memberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya atas partisipasi dan dukungannya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wa barakatuh.

Yogyakarta, 13 Maret 2024



**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

HAMENGKU BUWONO X